

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP
PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI PEDESAAN PASCA
ERUPSI SINABUNG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh

Nama : Laiga Asmara
NPM : 1505180061
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : LAIGA ASMARA
NPM : 1505180061
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI PEDESAAN PASCA ERUPSI SINABUNG

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Penguji II

(HADRIMAN KHAIR, SP, M.Sc)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : LAIGA ASMARA

N.P.M : 1505180061

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA
TERHADAP PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL
EKONOMI PEDESAAN PASCA ERUPSI SINABUNG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : LAIGA ASMARA
NPM : 1505180061
Konsentrasi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan.....20.
Pembuat Pernyataan


The stamp is a rectangular official seal of Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). It features the university's logo (a bird) at the top center, the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA' around the perimeter, and a central identification number '332AFF561327639'. Below the stamp, the name 'Laiga Asmara' is handwritten in black ink.

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : LAIGA ASMARA
N.P.M : 1505180061
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI PEDESAAN PASCA ERUPSI SINABUNG

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
6/2-2019	Bab IV harus di buat dan Gambar Umum Apr. Kondisi Geografi Demografi		
4/3-2019	Tambahkan kondisi Demografi di Bab IV dan Revisi Kurasi 4 ke Laporan		
6/3-2019	Kurasi rumus sedikit lg dan tambahkan data Sekunder di Indragiri Nomor masalah 3 → 2 tipologi kelas		
8/3-2019	Revisi penyusunan Data Laporan Kurasi ini di urutkan data Entry ke Excell.		
9/3-2019	Analisis Data Pompa May 11 Kurasi agar lebih tepat sesuai		
11/3-2019	Revisi Data dan analisis Data yg lebih akurat Ms. 1-3.		
15/3-2019	Sudah selesai Revisi All yg dikerjakan !!		

Pembimbing Skripsi

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS)

Medan, Maret 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS)

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Pedesaan Pasca Erupsi Sinabung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perkembangan Indikator Sosial Ekonomi di Kabupaten Karo Pasca Erupsi Sinabung? Bagaimana perkembangan Dana Desa di Kabupaten Karo Pada 4 Kecamatan yang terkena Langsung Erupsi Sinabung? Bagaimana Persepsi Dana Desa Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat di desa yang terkena Langsung Erupsi Sinabung ? dan Bagaimana Indeks Ketimpangan Produksi sub-sektor tanaman Pangan dan Holtikultura di Kabupaten Karo Pasca Erupsi Sinabung, Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis secara deskriptif perkembangan Indikator Sosial Ekonomi, Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Karo pada 4 Kecamatan, Persepsi Dana Desa terhadap Kualitas Hidup Masyarakat di desa yang terkena langsung erupsi dan Indeks Ketimpangan Produksi Sub-sektor tanam Pangan dan Holtikultura di Kabupaten Karo, Indikator Sosial Ekonomi sebelum dan setelah erupsi Gunung Sinabung, menganalisis Perkembangan Dana Desa pada 4 Kecamatan pada tahun 2010 – 2017, Persepsi Dana Desa untuk Kualitas Hidup Masyarakat di desa menunjang Ekonomi baik secara (sosialisasi, pengelolaan dana desa APBDes, mau pun Penggunaan Dana Desa), dan menghitung Indeks Ketimpangan tentang Pemetaan Sub-Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Luas lahan di Kabupaten Karo.

Kata Kunci : Indikator Sosial Ekonomi Dana Desa Pasca Erupsi Sinabung

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“Analisis Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Pedesaan Pasca Erupsi Sinabung”**. Shalawat dan salam tak lupa saya ucapkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. yang mana ia telah membuka pintu pengetahuan bagi kita tentang ilmu hakiki dan sejati yang dituntun untuk menggapai duniawi dan akhirat.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yaitu : yang Teristimewa untuk Ayahanda (**Hemtasaran**) dan Ibunda tercinta (**Nyimas Khodijah**) yang telah membesarkan dan mendidik penulis bisa seperti sekarang ini dan terima kasih telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis baik material maupun doa yang tiada hentinya. Mudah-mudahan penulis dapat dapat membahagiakan Ayanhanda dan Ibunda kelak. Amin

2. Abang dan Kakak tersayang **Rayen Pisra, dan Hennie Mertiani S.Kom** yang menjadi penyemangat dalam perjuangan menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yaitu kepada :

1. Bapak **Dr.Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
2. Ibu **Dr. Prawidya Hariani Rs** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu **Dr.Prawidya Hariani RS** selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan UMSU
4. Ibu **Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si** selaku Sekretaris Program studi Ekonomi Pembangunan UMSU
5. Seluruh dosen-dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis selama ini.
7. Untuk teman-teman A Pagi Ekonomi Pembangunan stambuk 2015, terima kasih telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan dalam menyusun skripsi di FEB UMSU dan 3,5 tahun kita bersama-sama belajar

serta bercanda riang dalam kelas, saling membantu dalam hal apapun tidak akan pernah terlupakan selamanya.

8. Sahabat seperjuangan yang penulis sayangi (**Putra Kasasona, Nur Sari dan Desy Aisyah,**) yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, nasehat dan membantu penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dan tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga amal kebaikan dari semua pihak di atas mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

Laiga Asmara

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	21
1.3 Batasan Dan Rumus Masalah	23
1.3.1 Batasan Masalah	23
1.3.2 Rumusan Masalah	23
1.4 Tujuan Penelitian	23
1.5 Manfaat Penelitian	24
1.5.1 Akademik	24
1.5.2 Non Akademik	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1 Uraian Teoritis	26
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	26
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	35

2.1.3	Pengeluaran Pemerintah	48
2.2	Kebijakan Pemerintah	55
2.2.1	Peraturan Kebencanaan	61
2.2.2	Kebijakan Dana Desa	65
2.3	Penelitian Terdahulu	68
2.4	Kerangka Penelitian	69
2.4.1	Bagan Tahapan Penelitian	70
2.4.2	Kerangka Konseptual Model I.....	71
2.4.3	Kerangka Konseptual Model II	73
BAB III	METODE PENELITIAN	74
3.1	Pendekatan Penelitian	74
3.2	Defenisi Operasional.....	75
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	76
3.3.1	Lokasi Penelitian	76
3.3.2	Waktu Penelitian	76
3.4	Jenis dan Sumber Data	76
3.4.1	Jenis Data	76
3.4.2	Sumber Data	77
3.5	Populasi dan Sampel	77
3.5.1	Populasi	77
3.5.2	Sampel	77

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	78
3.7 Teknik Analisis Data	79
3.7.1 Analisis Deskriptif	79
3.7.2 Analisis Faktor	79
A. Model Analisis Faktor	80
B. Metode Analisis Faktor	80
a. <i>Uji Determinant of Correlation Matrix</i>	81
b. <i>Kaiser Meyer olkin Measure of Sampling (KMO)</i> 81	
c. <i>Bartlett Test of Sphericity</i>	81
3.8 Tahapan Analisis	85
3.9 Analisis Tipologi Klassen	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
4.1 Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Di Kabupaten Karo	
Pasca Erupsi Sinabung	90
4.1.1 Gambaran Umum Geografi Kabupaten Karo	90
a. Letak	90
4.1.2 Kondisi Iklim dan Topologi	92
a. Topografi	92
b. Iklim	93
c. Luas wilayah.....	94
4.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Karo	95

a.	Jumlah Penduduk	95
b.	Tingkat Kepadatan Penduduk	97
c.	Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan	98
4.1.4	Ketenagakerjaan	99
a.	Potensi Wilayah Kabupaten	101
4.1.5	Kabupaten Karo Pasca Erupsi Gunung Sinabung	104
a.	Kondisi Geografis	104
4.1.6	Potensi Ekonomi Makro Kabupaten Karo	105
1.	Indikator-indikator Ekonomi Kabupaten Karo	105
a.	Struktur Ekonomi	105
b.	Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	105
c.	Distribusi Tentang Penyebaran Penduduk dalam Persentasi Per Kecamatan di Kabupaten Karo Sebelum Erupsi Sinabung Tahun 2010 dan Pasca Erupsi	107
d.	Kontribusi Sektoral dari PDRB	109
e.	PDRB Per Kapita	110
f.	Pengeluaran Rumah Tangga	111
g.	Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga	112
h.	Pengangguran	114
4.1.7	Kondisi Sosial	115
1.	Indikator-indikator Sosial Kabupaten Karo	115
a.	Indeks Pembangunan Manusia	115
2.	Komponen-Komponen Pembangunan Manusia	117
b.	Penduduk Miskin	118

3. Jenis-jenis Kemiskinan	118
c. Rasio Jenis Kelamin (Sek Rasio)	122
d. Ketenagakerjaan (Employment)	124
4.1.8 Wilayah Kecamatan dan Desa yang langsung terkena oleh erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo	125
4.2 Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Karo pada 4 Kecamatan yang Terkena langsung erupsi gunung Sinabung	129
4.3 Persepsi Dana Desa Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat di desa yang terkena Langsung erupsi Sinabung	131
1. Deskriptif Data	131
4.3.1 Pembahasan Uji Validitas dan Reabilitas	136
1. Uji Validitas	137
2. Uji Reliabilitas	137
4.3.2 Pembahasan Analisis Faktor	138
1. Matriks Korelasi (KMO)	138
2. Uji MSA (Measure of Sampling Adequacy)	139
3. Ekstraksi Faktor	140
4.Total Variance Explained	143
5. Faktor Loading	144
6. Component Transformation Matrix	150

7. Interpretasi Faktor	150
4.4 Indeks Ketimpangan Produksi Sub Sektor Tanam Pangan dan Holtikultura di Kabupaten Karo Pasca Erupsi Sinabung	152
1. Analisis Tipologi Klassen	152
a. Analisis Tipologi Klassen Indeks Kerimpangan Produksi Sub Sektor tanam Pangan dan Holtikultura	152
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	155
5.1 Kesimpulan	155
5.2 Saran	157
5.2.1 Bagi Dunia Penelitian	157
5.2.2 Bagi 4 Kecamatan di Kabupaten Karo	158

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Lokasi Desa Yang Letaknya di Radius 5 km dari Gunung Sinabung	5
Tabel 1.2 Lokasi Pengungsi Erupsi Sinabung Kabupaten Karo Tanggal 1 Maret 2015	7
Tabel 1.3 Sebaran Dana Desa Anggaran Tahun 2017 Di Provinsi Sumatera Utara	11
Tabel 1.4 Data Dana Desa Per Provinsi	14
Tabel 1.5 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2016	16
Tabel 1.6 Luas dan Tinggi Wilayah Kabupaten Karo	19
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	68
Tabel 3.1 Definisi Operasional	75
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten Karo	92
Tabel 4.2 Rata-rata Jumlah hujan dan Curah setiap Bulan di Kabupaten Karo Pada Tahun 2011-2015	93
Tabel 4.3 Luas Dan Tinggi Wilayah di Kabupaten Karo Per Kecamatan Tahun 2013	94

Tabel 4.4	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Karo Per Kecamatan Tahun 2010-2016	98
Tabel 4.5	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Karo Menurut Kecamatan dan Pendidikan 2013-2015	100
Tabel 4.6	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Karo ADHK Tahun 2011-2016 ...	102
Tabel 4.7	Perkembangan Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Karo ADHK Tahun 2010-2017	106
Tabel 4.8	Distribusi Jumlah Penduduk Bermukim Pada Per Kecamatan Di Kabupaten Karo Sebelum Erupsi di Tahun 2010 dan Setelah Erupsi di Tahun 2016	108
Tabel 4.9	Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Karo ADHK Tahun 2010-2016	109
Tabel 4.10	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo Menurut Pengeluaran (Persen) 2011-2016	111
Tabel 4.11	Laju Implisit PDRB Kabupaten Karo Menurut Pengeluara (Persen) 2011-2016	113
Tabel 4.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karo 2015	115
Tabel 4.13	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karo	

Tahun 2010-2016	116
Tabel 4.14 Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten	
Karo Tahun 2010-2016	117
Tabel 4.15 Garis Kemiskinan di Kabupaten Karo Tahun 2010-2016	
.....	120
Tabel 4.16 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karo	
2010-2016	121
Tabel 4.17 Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten	
Karo Tahun 2010-2016.....	123
Tabel 4.18 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok umur (jiwa)	
Tahun 2010-2016	124
Tabel 4.19 Data Lokasi Desa yang letaknya di Radius 5 km dari	
Gunung Sinabung	125
Tabel 4.20 Data Jumlah Perkembangan Dana Desa Kabupaten	
Karo	128
Tabel 4.21 Data Jumlah Perkembangan Dana Desa	
Perdesa (259:) desa	129
Tabel 4.22 Jenis Kelamin	131
Tabel 4.23 Usia Responden	132
Tabel 4.24 Jenis Pekerjaan	133
Tabel 4.25 Pendidikan	134
Tabel 4.26 Penghasilan Perbulan	135

Tabel 4.27 Uji Validitas	136
Tabel 4.28 Uji Reliabilitas	137
Tabel 4.29 KMO And Bartlett's Test	139
Tabel 4.30 Uji MSA	139
Tabel 4.31 Uji Communalitas	139
Tabel 4.32 Total Variance Explained	140
Tabel 4.33 Faktor Loading	144
Tabel 4.34 Component Matrix ^a	148
Tabel 4.35 Component Transformation Matrix	150
Tabel 4.36 Hasil Penamaan Faktor	151

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Luncuran Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung	4
Gambar 2.1.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	52
Gambar 2.1.2 Kurva Peacock dan Wiseman	54
Gambar 2.1.3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave	54
Gambar 2.2. Bagan Tahapan Penelitian	70
Gambar 2.3 Kerangka Model Penelitian Analisis Faktor yang Pendapatan Rumah Kerangka Konseptual Model I..	71
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Model II Dampak Erupsi Sinabung	73
Gambar 3.1 Bagan Analisis Faktor	84
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Karo Per Kecamatan	91
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kabupaten Karo Setelah Erupsi Gunung Sinabung	104
Gambar 4.3 Jenis Kelamin	132
Gambar 4.4 Usia Responden	133
Gambar 4.5 Pendidikan	134
Gambar 4.6 Penghasilan	135

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan posisi geografisnya, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis Indonesia yang demikian menempatkan Indonesia di posisi silang, sehingga Indonesia berada pada jalur perdagangan yang ramai. Wilayah Indonesia yang dilewati oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik membuat Indonesia berada pada negara rawan bencana. Indonesia yang terletak di lempeng tektonik atau juga masuk dalam wilayah cincin api (*ring of fire*), yang berarti Indonesia rawan terkena gempa bumi dan dapat menimbulkan tsunami, di karenakan, jika ada pergerakan lempeng dari keduanya maka dapat berpotensi menimbulkan gempa bumi. Selanjutnya jika terjadi tumbukan antara lempeng tektonik di laut dapat menghasilkan tsunami.

Catatan dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa ada 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami. Diantaranya adalah wilayah NAD (Nangroe Aceh Darussalam), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) bagian Selatan, Jawa Timur bagian Selatan, Bali, NTB (Nusa Tenggara Barat) dan NTT (Nusa Tenggara Timur). Kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan Kalimantan Timur

(www.airputih.or.id).

Indonesia juga merupakan jalur *The Pasific Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik), yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Cincin Api Pasifik membentang diantara subduksi maupun pemisahan lempeng Pasifik dengan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara dan lempeng Nazca yang bertabrakan dengan lempeng Amerika Selatan. Indonesia memiliki gunung berapi dengan jumlah kurang lebih 240 buah, di mana hampir 70 di antaranya masih aktif. Zona kegempaan dan gunung api aktif Circum Pasifik amat terkenal, karena setiap gempa hebat atau tsunami dahsyat di kawasan itu, di pastikan menelen korban jiwa manusia amat banyak (www.airputih.or.id .2015)

Data dari PBB untuk strategi Internasional pengurangan Risiko Bencana (UN-ISDR) menyebutkan bahwa Indonesia berada dalam posisi puncak dunia dari ancaman tsunami. Dalam bencana tsunami, indonesia menempati rangking 1 dari 265 negara dengan jumlah 5.402.239 orang yang akan terkena dampaknya, Bencana tanah longsor, Indonesia menempati rangking 1 dari 162 negara dengan jumlah 197.372 orang yang akan terkena dampaknya. Bencana Gempa Bumi Indonesia menempati rangking 3 dari 153 negara dengan jumlah 11.056.806 orang yang akan terkena dampaknya.

(www.alamendah.org, 2015)

Di Indonesia sendiri khususnya wilayah Sumatera Utara juga tidak luput dari ancaman Bencana Alam. Hal ini dikarenakan, posisi geografis Sumatera Utara yang terletak di patahan sesar sumatera dan juga dilintasi Bukit Barisan yang diantaranya terdiri dari gunung api aktif membuat Sumatera Utara rawan terhadap bencana

(<http://waspada.co.id>). Diakses tanggal 19 Januari 2015 pukul 15.19 WIB)

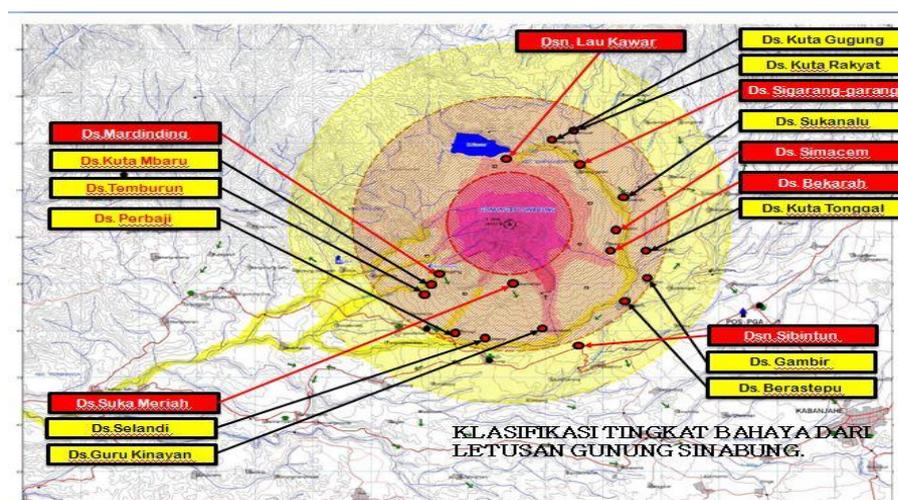
Di Sumatera Utara terdapat gunung berapi yang masih aktif maupun tidak aktif yaitu sebagai berikut, Gunung Sibuatan yang merupakan Gunung tertinggi di Sumatera Utara tidak aktif. Gunung Sinabung yang merupakan salah satu gunung yang masih aktif di Sumatera Utara Gunung toba (pusuk buhit). Gunung Sibayak merupakan salah satu gunung api aktif di Sumatera Utara yang terletak di Kabupaten Karo tepatnya tidak jauh dari kotan Berastagi gunung ini juga sering menjadi tempat dekian para pendaki dan pencinta gunung berapi walaupun gunung ini tidak berbahaya namun tetap harus berhati-hati. Gunung sorik Merapi merupakan gunung berapi yang terletak dalam kawasan Batang gadis, secara adminitratif berada di Desa sibonggor Julu kecamatan sorak Merapi kabupaten Mandailing Natal. Gunung Sinabung merupakan salah satu objek pariwisata kebanggaan Sumatera Utara berada pada titik puncak dengan ketinggian 2.640 meter di atas permukaan air laut dengan status aktif. Gunung sinabung adalah gunung api di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Sinabung bersama Gunung Sibayak didekatnya adalah dua gunung berapi aktif yang ada di sumatera Utara .

Gempa yang diakibatkan adanya gunung meletus dapat menimbulkan dua jenis bahaya, yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Kedua jenis bahaya ini sama akan berdampak buruk bagi kehidupan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi setelah adanya gunung meletus, pertama adalah dampak adanya lava,lahar dan lontaran material antara lain banyak korban jiwa karena terkena lava atau terseret lahar, adanya kerusakan areal sawah di sekitar gunung, desa sekitar gunung terendam lahar dan adanya kebakaran hutan di sekitar gunung. Kedua, dampak adanya abu letusan

yang menimbulkan masalah pernafasan, timbulnya kesulitan penglihatan, adanya pencemaran sumber air bersih, adanya badai listrik, adanya gangguan kerja mesin dan kendaraan bermotor, terjadi kerusakan pada atap-atap rumah, rusaknya lingkungan sekitar gunung, dan adanya kerusakan infrastruktur seperti jalan dan bandara udara.

Salah satu gunung yang berada di wilayah Sumatera Utara adalah Gunung Sinabung. Sejak aktivitas pertamanya tahun 2010, Gunung Sinabung kian menyita perhatian banyak orang terutama masyarakat di tanah Sumatera. Gunung Sinabung merupakan salah satu gunung di dataran tinggi Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Setelah sekian lama ‘tertidur’ dari tidur panjangnya. Gunung yang memiliki puncak tertinggi 2.460 Meter dia atas permukaan laut ini pada tahun 2010 mulai menunjukkan aktivitasnya kembali. Kondisi lucuran awan panas dari Erupsi Gunung Sinabung dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Peta Luncuran Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung Kabupaten Karo



Sumber : Google Image (www.googlemap.com)

Banyak warga yang mengetahui gunung sinabung sudah tidak lagi meletus karena hampir 400 tahun sejak tahun 1600 Gunung sinabung tidak begejolak. Tahun 2010 tepatnya 27 Agustus 2010, gunung tersebut mulai menunjukkan aktivitasnya dengan mengeluarkan asap dan abu vulkanik. Setelah kejadian tersebut, Gunung Sinabung memasuki status awas, sejak tahun 2010 tersebut sekitar 12 ribu masyarakat yang bertempat tinggal di kaki Gunung Sinabung mulai diungsikan dan ditempatkan pada 8 lokasi.

Abu Vulkanik yang dihasilkan dari hasil letusan Gunung Sinabung menyebar ke segala penjuru arah. Jarak yang ditempuh abu Vulkanik tersebut tergolong jauh yaitu sampai kota Medan, bahkan sebagai kota Medan tertutup oleh abu Vulkanik Sinabung. Akibat abu Vulkanik tebal yang membatasi jarak pandang dan berbahaya untuk melakukan penerbangan.

Letusan yang Intensitasnya sangat sering, menyebabkan Kerusakan yang parah terhadap rumah tempat tinggal para pengungsi. Berikut Beberapa kecamatan yang ada disekitar Gunung Sinabung yang terkena dampak dari erupsi Gunung Sinabung dengan radius 5 km.

Tabel 1.1

Data Lokasi Desa yang Letaknya di radius 5 km dari Gunung Sinabung

Kecamatan Simpang Empat	Kecamatan Namanteran	Kecamatan Tiganderket	Kecamatan Payung
Desa Tiga Pancur	Desa Sigarang garang	Desa Tanjung Merawa	Desa Payung
Desa Berastepu	Desa Bekerah	Desa Tiganderket	Desa Sukameriah

Desa Pintu Besi	Desa Simacem	Desa Perbaji	Desa Gurukinayah
Desa Gamber	Desa Suka Nalu	Desa Temburun	Desa Selandi
Desa Kuta Tengah	Desa Kuta Tonggal	Desa Mardinding	Desa Ujung Payung
Desa Jeraya	Desa Naman	Desa Kutambaru	
Desa Beganding	Desa Kutambelin		
	Desa Kuta Gugung		

Sumber : BPS Kabupaten karo (www.karokab.go.id 2015)

Ada beberapa desa yang wilayahnya berada di lingkaran Gunung Sinabung , dimana desa tersebut sebahagiannya sudah masuk Wilayah Zona Merah. Yang artinya Wilayah dengan Zona Merah sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai tempat tinggal atau pemukiman. Desa yang dimaksud yaitu :

- Ø Kecamatan Simpang Empat :-
 - Desa Tiga Pancur
 - Desa Berastepu
 - Desa Beganding
 - Desa Pintu Besi
- Ø Kecamatan Tiganderket :- Desa Mardinding
- Ø Kecamatan Payung :- Desa Payung
- Ø Kecamatan Namanteran :- Desa Sibintun

Ketika kondisi Gunung Sinabung masih bersahabat, dominan masyarakat yang tinggal di sekitar kaki gunung tersebut menggantungkan kehidupannya pada lahan mereka. Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut adalah petani. Hal ini dikarenakan lahan dan cuaca iklim yang sangat mendukung. Maka dari itu

tanah karo sangat terkenal dengan hasil pertaniannya, bahkan sampai ke kota medan, Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo, Purwo, Nugroho, berdasarkan perhitungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Karo, kerugian sementara di sektor pertanian dan perkebunan sejak Gunung Sinabung meletus hingga 6 Januari 2014 diperkirakan mencapai Rp 712,2 miliar (www.mediaindonesia.com, 2015)

Hingga pengujung tahun 2014 ini Gunung tersebut masih menunjukkan aktivitasnya. Sampai tanggal 16 Januari 2015, Gunung Sinabung memasuki status Siaga Level III. Berdasarkan data dari pemerintah Karo per tanggal 16 Januari 2015 jumlah pengungsi erupsi Gunung Sinabung mencapai 795 KK dengan jumlah 2444 jiwa.

Tabel 1.2
Lokasi Pengungsi Erupsi Sinabung kabupaten karo Tanggal 1
Maret 2015

No	Pos Penampungan	Alamat	Kk	Jiwa
1.	GBKP Kota Berastagi	Jl. Gundaling	43	160
2.	Klasis GBKP Berastagi	Jl. Udara	99	264
3.	KWK Berastagi	Jl. Udara Berastagi	78	123
4.	GBKB Jl. Kutacane Kabanjahe	Jl. Kutacane	195	697
5.	UK Kabanjahe 1	Desa Ketaren	94	287
6.	UK Kabanjahe 2	Desa Ketaren	35	82

7.	Serba Guna KNPI	Jl pahlawan	251	829
	Jumlah		795	2442

Sumber : BPS Kabupaten karo (www.karokab.go.id, 2015)

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa masih banyak warga yang tinggal di pengungsian bahkan hingga saat ini.kondisi yang darurat memaksa pengungsi untuk menjalankan berbagai proses kehidupan di pengungsian dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat penulis saat berada di lapangan yakni di Pengungsian Universitas Karo (UKA 1). Keterbatasan dan kekurangan yang dimaksud seperti masyarakat harus tinggal dalam satu ruangan kelas dengan beberapa belasan keluarga didalamnya. Mereka tidur hanya beralasan tikar dan bersekat kardus indomie yang ditumpukkan atau juga peralatan rumah tangga yang masih bisa diselamatkan ataupun bantuan yang diberikan untuk memberi batas antar tiap keluarga.

Selain itu juga, kondisi pengungsian UKA 1 yang sangat tidak layak huni dan kurang diperhatiakn oleh pemerintah setempat seperti lingkungan pengungsian yang akan dipenuhi lumpur jika terjadinya hujan deras, minimnya penyediaan air bersih, dan juga kurangnya stok peralatan mandi. Konsumsi makanan sehari-hari yang jauh dari kata baik serta pemenuhan gizi anak yang kurang. Hal ini juga salah satunya disebabkan oleh makin minimnya bantuan yang diberikan kepada warga yang mengungsi dengan iikuti oleh meredupnya isu tentang meletusnya ataupun kondisi tentang Gunung Sinabung. Dengan kurangnya perhatian yang diberikan bagi warga

tersebut memaksa mereka untuk bekerja di lahan orang sebagai petani guna menyambung perekonomian mereka.

Padahal dalam UU 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana sudah dijelaskan hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat dalam situasi bencana serta dijelaskan bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Terlepas dari perkembangan sosial ekonomi di pengungsian sudah ada beberapa desa yang dipulangkan. Sekitar 13.828 jiwa pengungsi letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di luar radius lima kilometer dari kaki gunung diperbolehkan untuk kembali di desanya masing-masing. Menurut pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dari hasil pemantauan melalui satelit, tidak ada peningkatan dari ancaman signifikan dari erupsi Gunung Sinabung. Satgas Penangan Erupsi Sinabung memutuskan memulangkan puluhan ribu warga didesanya. Terhitung 31 Januari 2014 pukul 14,00 pengungsi di luar radius lima kilometer sudah bisa pulang ke rumah masing-masing.

Dalam pemulangan tersebut BNPB memberikan bantuan *cash for work* atau padat karya dengan insentif sebesar Rp 50.000 per keluarga perhari. Dana itu nantinya akan diberikan selama dua bulan ke depan. Selain itu juga akan diberikan bantuan jidup (jatah hidup) sebesar Rp 6.000 per orang per hari dan bantuan beras sebanyak 400 gram per orang per hari (mongabay.co.id, 2015).

Pemukiman yang mengalami rusak parah, dan lahan tempat masyarakat untuk bercocok tanam pun sudah hancur dan lenyap. Keberadaan Desa Suka Meriah yang berada pada radius 3 km dan merupakan lokasi potensial dialiri awan panas. Desa

tersebut cukup berbahaya untuk ditempati karena kemungkinan besar akan menimbulkan korban jiwa apabila masih terdapat aktivitas dari manusia di desa tersebut.

Dengan ini, ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat yaitu :

- a. Tingkat Pendidikan
- b. Pekerjaan
- c. Tingkat Pendapatan
- d. Kesehatan
- e. Tempat Tinggal
- f. Kepemilikan Lahan
- g. Kesejahteraan
- h. Aktivitas Ekonomi

1. Indikator Sosial

- a. Tingkat Pendidikan

sesuai dengan status sosial ekonomi karena merupakan fenomena Kesatuan sosial untuk semua individu.

- b. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi pemeliharaan.

- c. Tempat Tinggal

Tempat tinggal adalah bagian yang utuh dari pemukiman, bukan hasil fisik semata, melainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan obilitas sosial ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu.

d. Kepemilikan Lahan

Indikator Ekonomi yang sempit produksi pertanian akan tidak mampu untuk mencukupi biaya hidup keluarga tani.

2. Indikator Ekonomi

a. Pekerjaan

Secara umum sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan manusia.

Dalam arti sempit digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang

b. Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan satuan tingkatan yang berasal dari pemasukan keuntungan yang dihasilkan oleh penjual barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

c. Kesejahteraan

Istilah umum, kesejahteraan menunjukkan kaerah keadaan yang lebih baik, kondisi seseorang dalam kedaan makmur, dalam kedaan sehat dan damai.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu, provinsi yang mendapatkan anggaran transfer daerah dan dana desa ialah Provinsi Sumatera Utara menurut Kemendesa.

Tabel 1.3
Sebaran Dana Desa Anggaran Tahun 2017
Di Provinsi Sumatera Utara

(Riburupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Per Desa	Alokasi Per Kab/Kota	Alokasi Formula	Jumlah
	Kabupaten					
1.	Asahan	177	720,442	127,518,234	14,454,327	141,972,561
2.	Dairi	161	720,442	115,991,162	10,105,628	126,096,790
3.	Deli Serdang	380	720,442	273,767,960	29,292,326	303,060,286
4.	Karo	259	720,442	186,594,478	9,741,648	196,336,126
5.	Labuhanbatu	75	720,442	54,033,150	8,336,132	62,369,282
6.	Langkat	240	720,442	172,906,080	19,957,743	192,863,823
7.	Mandaling Natal	377	720,442	271,606,634	12,441,884	284,048,518
8.	Nias	170	720,442	122,475,140	10,451,108	132,926,248
9.	Simalungun	386	720,442	278,090,612	15,956,928	294,047,540
10.	Tapanuli Selatan	211	720,442	152,013,262	9,654,744	161,670,006
11.	Tapanuli Tengah	159	720,442	144,550,278	8,842,956	123,393,234
12.	Tapanuli Utara	241	720,442	173,626,522	7,072,304	180,698,826

13.	Toba Samosir	231	720,442	166,442,102	7,041,625	173,463,727
14.	KotaPadang Sidempuan	42	720,442	30,258,564	4,391,637	34,650,201
15.	Pakpak Barat	52	720,442	37,462,984	5,020,897	42,483,881
16.	Nias Selatan	459	720,442	330,682,878	16,135,592	346,818,470
17.	Humbang Hasundutan	153	720,442	110,227,626	7,285,660	117,513,286
18.	Serdang Bedagai	237	720,442	170,744,754	13,106,061	183,849,815
19.	Samosir	128	720,442	92,216,576	7,811,227	100,027,803
20.	Batu Bara	141	720,442	101,582,322	11,795,034	113,377,356
21.	Padang Lawas	303	720,442	218,293,926	9,882,445	228,176,371
22.	Padang Lawas Utara	387	720,442	278,811,054	9,270,857	288,081,911
23.	Labuhanbatu Selatan	52	720,442	37,462,984	8,559,478	46,022,462
24.	Labuhanbatu Utara	82	720,442	59,076,244	9,570,695	68,646,939
25.	Nias Utara	112	720,442	80,689,504	11,134,690	91,824,194
26.	Nias Barat	105	720,442	75,646,410	8,088,286	83,734,696
27.	Kota Gunungsitoli	98	720,442	70,603,316	9,214,822	79,818,138
JUMLAH		5,418	19,451,934	3,903,354,756	294,617,34	4,197,972,490

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017

Dari tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa kabupaten Karo menerima transfer Dana Desa yaitu Rp 196,336,126 dengan jumlah Desa 259 dan jumlah

transfer yaitu Rp 720,442. Namun kota Padang Sidempuan mendapatkan transfer terendah yaitu Rp 34,650,201 dengan jumlah Desa 42.

Kabupaten Karo Memiliki 17 Kecamatan, 10 Kelurahan Serta Memiliki 259 Desa dengan luas Wilayah mencapai 2.127,00 Km² dan jumlah penduduk sekitar 399.494 jiwa 187 jiwa/km² .

Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum dan setelahnya terjadinya bencana, pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, fokus rekonstruksi dan rehabilitas pasca erupsi bencana. adanya jaminan pemenuhan hak dan pengungsi yang terkena langsung erupsi diKabupaten Karo.

Kementerian keuangan Indonesia memberikan kebijakan transferdana daerah berupa dana desa yang dilakukan secara merta baik penyebarannya maupun besarnya di seluruh indonesia, pemerintah sudah harus meleakukan evaluasi kebijakan tata cara pembagian dan penetapan rincian dan desa setiap desa yang dilakukan untuk memastikan pembagian dana desa sesuai dengan ketentuan perundan-undangan, serta evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa untuk mengetahui realisasi penggunaan dana desa tersebut.

Pemerintah sudah harus melakukan evaluasi kebijakan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang dilakukan untuk memestikan pembagian dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Serta evaluasi

terhadap realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa untuk mengetahui realisasi penggunaan dan desa tersebut.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu, Salah satu provinsi yang mendapatkan anggaran transfer daerah dan dana desa ialah provinsi Sumatera Utara menurut Kemendes.

Tabel 1.4
Data Dana Desa Per Provinsi

Kabupaten	Tahun	Dana Desa
Karo	2015	675.837.460
Karo	2016	1.538.403.100
Karo	2017	1.963.361.260
Karo	2018	1730.218.820

Sumber (www.kemendes.go.id)

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa Transfer Dana Desa tahun 2015-2018 sebesar 2.409 triliun sedangkan hingga tahun 2018 sebesar 1,730 triliun. Kabupaten Karo setiap Tahunnya Mengalami Kenaikan akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan, dikarenakan adanya perubahan cara perhitungan penetapan dasar tersebut.

Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Desa memiliki hak asal-usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat ,maju,mandiri, dan

demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera

Tujuan dari UU Desa terdapat pada pasal 4 diantaranya yaitu memajukan perekonomian di desa serta kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa dalam pembangunan, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa menuju tercapainya otonomi desa untuk menciptakan Desa Mandiri, perlu adanya upaya untuk menata, mengelola, menggali, dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat dengan memberikan bantuan alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah Desa guna untuk meningkatkan sarana pelayanan Masyarakat.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan di kabupaten karo mengalami penurunan pada tahun 2010 hingga di tahun 2013.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah dijelaskan hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat dalam situasi bencana serta dijelaskan bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa pada Tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan Keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintah

Desa.dengan adanya kebijakan Dana Desa maka, pada pelaksanaan Kebijakan Dana Desa perlu untuk diterapkan dengan baik menurut Nugroho (2014).

Tabel 1.5
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karo Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2016

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	60,37	60,03	58,67	58,19	56,55	56,06	55,05
2.	Pertambangan dan penggalian	0,25	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23
3.	Industri pengolahan	3,01	3,03	3,14	3,08	3,26	3,38	3,37
4.	Pengadaan listrik dan gas	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07
5.	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
6.	Konstruksi	6,61	6,6	6,7	6,78	6,96	7,04	7,13
7.	Pedagang besar dan eceran; repasi, mobil dan sepeda motor	9,39	9,45	9,69	9,72	9,78	9,59	10,23
8.	Transportasi dan pergudangan	4,12	4,16	4,37	4,55	4,73	4,68	4,63
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,11	2,16	2,29	2,37	2,52	2,57	2,6
10.	Informasi dan komunikasi	0,96	0,88	0,86	0,79	0,75	0,72	0,71
11.	Jasa keuangan dan asuransi	1,16	1,17	1,26	1,29	1,38	1,42	1,38
12.	Real Estate	2,73	2,75	2,76	2,86	3,03	3,13	3,32
13.	Jasa perusahaan	0,2	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,2
14.	Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	5,12	5,16	5,46	5,51	5,83	6,03	5,91

15.	Jasa pendidikan	2,2	2,23	2,28	2,25	2,35	2,33	2,42
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,81	0,88	0,94	0,98	1,1	1,22	1,29
17.	Jasa lainnya	0,82	0,9	0,98	1,06	1,18	1,25	1,37
18.	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS (www.karokab.go.id) dan diolah

Menurut BPS Kabupaten Karo data dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di tahun 2010 sebesar 60,37% telah terjadi penurunan dari tahun ketahun termasuk di tahun 2014 sebesar 56,41%, selanjutnya dari Sektor Pertambangan di tahun 2010 sebesar 0,25% telah terjadi ketidak menentu selama 4 tahun kedepan yaitu di tahun 2014 sebesar 0,24%, Sektor Industri Pengolahan di tahun 2010 sebesar 3,01% telah terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2014 sebesar 3,26%, Sektor Listrik dan gas di tahun 2010 sebesar 0,08% kemudian telah terjadi penurunan 4 tahun kedepan yaitu di tahun 2014 sebesar 0,07%, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang di tahun 2010 sampai 2014 tidak terjadi perubahan yakni sebesar 0,08%, Sektor Kontruksi di tahun 2010 sebesar 6,61% telah terjadi Peningkatan di tahun 2014 sebesar 7,01%, Sektor Perdagangan di tahun 2010 sebesar 9,39% telah terjadi peningkatan sampai di tahun 2014 sebesar 9,92%, Sektor transportasi dan Pergudangan di tahun 2010 sebesar 4,12% telah terjadi Peningkatan sampai di tahun 2014 sebesar 4,73%, Sektor Penyedia akomodasi di tahun 2010 sebesar 2,11% telah terjadi Peningkatan sampai di tahun 2014 sebesar

2,52%, Sektor informasi dan Komunikasi di tahun 2010 sebesar 0,96% telah terjadi penurunan sampai di tahun 2014 sebesar 0,75%, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di tahun 2010 sebesar 1,16% telah terjadi peningkatan sampai di tahun 2014 sebesar 1,33, Sektor *real estat* (aset nyata) di tahun 2010 sebesar 2,73% telah terjadi peningkatan sampai di tahun 2014 sebesar 3,03%, Sektor Jasa Perusahaan di tahun 2010 sebesar 0,2% telah terjadi peningkatan sampai di tahun 2014 sebesar 0,19%, sektor administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib di tahun 2010 sebesar 5,12% telah terjadi Peningkatan sampai di tahun 2014 sebesar 5,83%, Sektor Jasa Pendidikan di tahun 2010 sebesar 2,2% telah terjadi peningkatan sampai di tahun 2014 sebesar 2,35%, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di tahun 2010 sebesar 0,81% telah terjadi peningkatan sampai di tahun 2014 sebesar 1,1% dan Sektor Jasa lainnya di tahun 2010 sebesar 0,82% telah terjadi peningkatan sampai di tahun 2014 sebesar 1,18%.

Penyumbang pendapatan terbesar di kabupaten karo adalah sektor pertanian, namun setelah terjadinya erupsi sinabung sektor pariwisata bisa menjadi sektor penyumbang pendapatan untuk kabupaten karo jika dapat dimanfaatkan dengan baik, pemanfaatan lokasi erupsi sinabung dapat dimanfaatkan dengan cara pembuatan desa wisata, untuk itu perlu adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah agar dapat memajukan pembangunan wisata tersebut. Di sekitaran lokasi yang terkena dampak erupsi dapat membuka beraneka ragam wisata, misalnya membuka arena *offroad* bagi masyarakat yang ingin mengunjungi area wisata, membuka wahana *exream*, membuka taman nasional, membuka penginapan disekitar wisata agar masyarakat yang mengunjungi dapat menginap untuk menikmati wisata tersebut,

membuka wisata kuliner khususnya masakan yang khas dari daerah kabupaten karo, dan dapat diiringi dengan masakan tradisional dari Sumatera Utara, masyarakat dapat membuka usaha seperti membuat *handicraft* ciri khas dari karo untuk di perjual belikan di sekitaran wisata, dengan adanya pembangunan wisata di lokasi gunung sinabung dapat membantu masyarakat untuk membangun ekonominya kembali setelah bencana erupsi gunung sinabung yang menghabiskan mata pencaharian mereka yaitu bertani, dengan itu perlu adanya dorongan pemerintah agar dapat memajukan sektor wisata di kabupaten karo dan meningkatkan pendapatan daerah dari wisata tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa yang melakukan *tourisme village* dan sampai saat ini banyak yang mengunjungi wisata tersebut baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dengan ini, sangat diharapkan bagi pemerintah untuk mempunyai *mindset* kedepan untuk membangun kembali daerah kabupaten karo. Setelah gunung sinabung meluluhlantahkan daerah kabupaten karo.

Akibat erupsi tersebut pemukiman penduduk disekitar Gunung Sinabung meliputi yang berada diwilayah kabupaten karo terkenal sebagai daerah pertanian holtikultura. Salah satu yang dilakukan pemerintah yaitu dengan merencanakan beberapa titik lokasi hunian sementara yang dibangun di kecamatan simpang Empat, Kecamatan Naman Teran, Kecamatan Tiga Ndreket dan kecamatan Berastagi.

Tabel 1.6

Luas dan tinggi wilayah kabupaten karo

Kecamatan	Luas	Tinggi
-----------	------	--------

010	Mardinding	267,11	270 – 560
020	Laubaleng	252,6	200 – 520
030	Tigabinanga	160,38	450 -750
040	Juhar	218,56	650 – 1 030
050	Munte	125,64	750 – 1 250
060	Kutabuluh	195,7	600 – 1 100
070	Payung	47,24	500 – 1 500
071	Tiganderket	86,76	500 – 1 500
080	Simpang Empat	93,48	700 - 1.420
081	Naman Teran	87,82	700 - 1.420
082	Merdeka	44,17	1 000 – 1 400
090	Kabanjahe	44,65	1 000 – 1 270
100	Berastagi	30,5	1 200 – 1 300
110	Tigapanah	186,84	1 100 – 1 350
111	Dolat Rayat	32,25	1 200 – 1 420
120	Merek	125,51	900 – 927
130	Barusjahe	128,04	1 200 – 1 400
	Karo	2127,25	

Sumber : BPS Kabupaten karo (www.karokab.go.id, 2013)

Salah satu pembangunan tujuan pembangunan sektor pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan khususnya para petani melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan. Yang mencakup 5 subsektor yaitu :

1. Subsektor Tanaman Pangan

2. Subsektor Hortikultura
3. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat
4. Subsektor Peternakan
5. Subsektor Perikanan.

Dampak Erupsi Gunung Sinabung sangat mempengaruhi kondisi masyarakat di sekitar kaki Gunung Sinabung, baik dari sektor ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kondisi dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap hasil pertanian sayur dan buah di Kabupaten Karo sangat memperhatikan dan menimbulkan dampak kerugian yang berat bagi tata kehidupan masyarakat kepada sosial ekonomi. Hal ini membuat masyarakat kehilangan lahan pertaniannya.

Erupsi Gunung Sinabung terjadi pada masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berupaya untuk mengayomi masyarakat Kabupaten Karo dengan upaya-upaya membangun kembali Produktivitas Perekonomian daerah Kabupaten Karo dalam hal pendidikan, Pemberdayaan masyarakat melalui *chase for work* atau padat karya, Presiden meminta OJK untuk melakukan penjadwalan kembali utang-utang Korban Bencana Sinabung, Mengalokasikan Dana Bantuan mengatasi Kerusakan di sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dll

Dalam kasus ini, kondisi Sosial Ekonomi pasca Erupsi Sinabung tidak hanya berdampak negatif saja bagi desa penduduk sekitar, tetapi ada peluang-peluang yang dimiliki nilai ekonomi yang tinggi yang bisa dikembangkan setelah disaster maka peluang ini memberikan alternatif untuk mendapatkan tambahan pendapatan bagi pedesaan masyarakat khususnya rumah tangga dengan terjadinya erupsi maka di desa tersebut sebagai desa wisata, sebab setelah disaster daerah yang terkena erupsi maka

tanahnya akan menjadi lebih subur sehingga pasca erupsi daerah sekitar gunung sinabung dapat dijadikan sebagai salah satu wisata berbasis pertanian, dan juga bangkit dari bencana dengan membuka usaha kecil-kecilan, sehingga akan memberikan nilai tambah untuk daerah sendiri atau indikator ekonomi makro : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten karo, Tingkat pengangguran, PDRB riil kabupaten karo, proyeksi/target pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian tertarik untuk lebih dalam meneliti bagaimana kondisi sosial ekonomi dengan adanya kebijakan Dana Desa untuk desa yang terkena langsung erupsi gunung sinabung.

“Analisis Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Perkembangan Indikator Ekonomi Pasca Erupsi Sinabung”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka didapat beberapa masalah :

1. Major volcanoes of Indonesia, di Indonesia Negerinya Super Bencana karena memiliki Gunung api nyaris 60% gunung aktif, di Sumatera Utara khususnya tepatnya di kabupaten karo terdapat dua Gunung aktif Sinabung dan Sibaya, dampak Bencana Alam yang ditimbulkan oleh Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mengakibatkan lahan pertanian, Hortikultura dan Pemukiman menjadi rusak parah.
2. Erupsi Gunung Sinabung menyebabkan ketidakstabilan Sosial Ekonomi penduduk di Kabupaten Karo

3. Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari Erupsi Sinabung terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Karo.
4. Fokus kebijakan dana desa hanya untuk pembangunan pemukiman yang terkena langsung erupsi Gunung Sinabung.
5. Seberapa besar Pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya Kebijakan Dana Desa untuk Peningkatan Kualitas masyarakat di Kabupaten Karo?
6. Terdapat Potensi Ekonomi yang besar dari adanya Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Ada banyak masalah yang bisa diangkat dari Penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah, jadi penelitian ini hanya dibatasi pada masalah seberapa besar Dana Desa mampu mempengaruhi Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Pedesaan Pasca Erupsi Sinabung

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, batasan masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi di Kabupaten Karo Pasca erupsi Sinabung
2. Bagaimana Perkembangan Dana Desa di kabupaten karo pada 4 kecamatan yang terkena langsung erupsi Sinabung

3. Bagaimana Persepsi Dana Desa terhadap Kualitas hidup masyarakat di desa yang terkena langsung Erupsi Sinabung
4. Bagaimana Indeks Ketimpangan Produksi sub-sektor tanaman Pangan dan Holtikultura di Kabupaten Karo Pasca erupsi Sinabung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dari penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi
2. Melakukan analisis Perkembangan Dana Desa Terhadap Indikator Sosial Ekonomi di desa yang terkena langsung.
3. Melakukan analisa faktor tentang Indikator – Indikator Ekonomi dan Sosial yang dipengaruhi oleh Kebijakan Dana Desa di desa yang di Kecamatan yang terkena Erupsi di Kabupaten Karo
4. Menganalisis dengan cara Menghitung Indeks Ketimpangan Produksi dan Melakukan Pemetaan dengan Tipologi Klassen untuk Ketimpangan Produk tanaman pangan dan Holtikultura.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1.5.1 Akademik

- a. Bagi Program Study untuk Peneliti

(1) Secara akademis dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam menambah referensi dan kajian serta studi komparatif bagi peneliti

atau Mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Pasca Erupsi yang terjadi.

(2) Sebagai tambahan Literatur terhadap Penelitian sebelumnya

b. Bagi Mahasiswa

(1) Untuk menyelesaikan studynya agar mendapatkan gelar Sarjana

(2) Agar dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembuatan program khususnya penelitian mengenai dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap Perekonomian Kabupaten Karo dan juga sebagai saran untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori sudah diperoleh di bangku kuliah.

1.5.2 Non Akademik

- a. Agar dapat memperoleh pertimbangan dalam mengambil kebijakan, memperoleh solusi dalam memecahkan masalah Sosial Ekonomi, dan memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintah.
- b. Menjadi bahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Karo dalam *mengrecovery* secara fisik Sosial dan Ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (*gross national income – GNI*) per kapita “riil” sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro dan Smith, 2011:16).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro dan Smith, 2011:17).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006).

Salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi

yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi.(Jhingan,2010).

A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam smith (1723-1790) bapak dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya yaitu teori yang menyelidiki fakto-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (1776) yang terkenal dengan buku *Wealth of Nations* yang tema pokoknya mengenai bagaimana perekonomian itu tumbuh. Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) total, dan pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. (Jhingan *Pembangunan Ekonomi dan Perancangan* halaman 81).

Menurut Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang mengang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam

proses pertumbuhan output maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Stok modal, menurut Smith, merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Perannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber alam).

Faktor penunjang yang yaitu tingkat keuntungan yang memadai. Tingkat keuntungan ini erat hubungannya dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot, dan pada akhirnya akan mengurangi gairah para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal menurut Adam Smith, dalam jangka panjang tingkat keuntungan tersebut akan menurun dan pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal pada posisi stasioner perekonomian tersebut.

Kritik terhadap teori Adam Smith

Seperti gambarkan, di muka, teori Adam Smith ini telah memberikan sumbangan yang besar dalam menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi terjadi dan fakto-faktor apa yang dapat menghambat. Namun demikian, ada beberapa kritik terhadap teori Adam Smith antara lain :

a. Pembagian Kelas dalam Masyarakat

Teori smith ini didasarkan pada lingkungan sosial ekonomi yang berlaku di Inggris dan di beberapa negara Eropa. Teori ini mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara tegas yaitu antara golongan kapitalis (termasuk tuan tanah) dan para buruh. Padahal dalam kenyataannya, seringkali kelas menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat modern. Dengan kata lain, teori smith mengabaikan peranan kelas menengah dalam mendukung pembangunan ekonomi

b. Alasan Menabung

Menurut Smith orang yang dapat menabung adalah para kapitalis, tuan tanah, dan lintah darat. Namun ini adalah alasan yang tidak adil, sebab tidak terpikirkan olehnya bahwa sumber utama tabungan di dalam masyarakat yang maju adalah para penerima pendapatan, dan bukan kapitalis serta tuan tanah.

2. David Ricardo

Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatasan dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Jhingan dan Torado). Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1917). Melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah “pada

awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi. Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu :

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri
2. Berlakunya hukum : “ law of deminishing return “ bagi tanah
3. Persediaan tanah adalah tetap
4. Permintaan gandum benar- benar inelastik
5. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel
6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modsl
10. Terdapat persaingan sempurna
11. Pemupukan modal dihasilkan dan keuntungan

Teori David Ricardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

akan mengalami kenaikan yang signifikan bila mana faktor-faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

B. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori Pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu Negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu

1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisonal adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi sunsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*.

Kondisi nilai menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semaca ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan *output* yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi dari padatingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk *horizontal*. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

C. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (human capital). (Todaro & Smith, 2011).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktivitas yang sama dengan pekerjaan di sektor industri pada masa

tensisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011).

D. Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Fei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang berlebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonominya berhenti. Kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional.

Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Fei dan Ranis membuat asumsi berikut :

1. Adanya ekonomi dua-muka yang terbagi dalam sektor, pertanian tradisional yang mandeg, dan sektor industri yang aktif.
2. *Output* sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh aja.
3. Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi).
4. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap.
5. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel.
6. Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol.

Jika penduduk melampaui jumlah di mana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi keluaran (*output*) pertanian.

7. *Output* sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh aja.
8. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen.
9. Upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian.
10. Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk-produk pertanian.

Berdasarkan asumsi, Fei dan Rais menelaah pembangunan ekonomi surplus-buruh menjadi tiga tahap. Pada *tahap pertama*, para penganggur tersamar yang tidak menambah *output* pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Pada *tahap kedua*, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil dari pada upah institusional yang mereka peroleh. Ini mengawali tahap ketiga, yang menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar dari pada perolehan upah institusional.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu

gambaran ekonomi pada suatu saat. Sedangkan kuznet (Jhingan, 2000:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus mengikat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang (Sukirno, 2004 : 435). Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

1. Teori pertumbuhan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam bukunya berjudul *An inquiry into the nature of the wealth of the nation* ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total.

a) Pertumbuhan output

Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokoknya, yaitu :

1. Sumber daya alam
2. Sumber daya manusia
3. Stok kapital yang tersedia

Sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan

batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun.

Tetapi apabila output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya. Tingkat ketersediaan sumber daya alam ini akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi (dalam arti pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk) akan berhenti apabila batas atas ini dicapai.

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap mempunyai peranan aktif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya apabila stok kapital yang tersedia membutuhkan pekerja 1 juta orang untuk menggunakannya, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia hanya 900 ribu orang maka jumlah penduduk yang akan menempati pekerjaan itu akan cenderung meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya akan mencapai 1 juta orang.

Unsur produksi yang ketiga yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan *output*. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan *output*. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital. Di samping itu laju pertumbuhan *output* juga tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Pertumbuhan itu akan terus melaju hingga akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan dukungan sumber daya manusia yang terampil.

b) Pertumbuhan penduduk

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2006).

2. David Ricardo

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Kesimpulan umumnya juga masih tetap sama yaitu bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya mencapai posisi stasioner. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (yaitu, sumber-sumber alam) tidak dapat bertambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatasan dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Perbedaan terutama terletak pada penggunaan lat analisis mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Ricardo yang terkena itu) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian di antara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan. (Kuncoro, 2000)

Proses pertumbuhan yang digambarkan Ricardo ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terbatasnya jumlah tanah, yang sangat susah untuk diperluas, sebagai faktor produksi.
- b. Peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja (penduduk) sesuai dengan tingkat upah yaitu apakah di atas atau dibawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut tingkat upah alamiah (*natural wage*).
- c. Akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat.
- d. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi.
- e. Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan.

3. Thomas Robert Malthus

Dalam pandangan mazhab Klasik mengenai perkembangan ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh dari gagasan Malthus tentang signifikansi masalah pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian maka hal ini perlu diperhatikan karena masalah penduduk mempunyai arti dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Malthus secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan lebih cepat dari pada suplai makanan. Produksi makanan per kapita, tentu saja akan mengalami penurunan, sementara populasi mengalami kenaikan. Malthus berpendapat bahwa tidak menjadi jaminan kalau pertumbuhan penduduk secara kuantitatif akan berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan. Malthus memberikan sejumlah faktor kendala terhadap kelangsungan pertumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitatif sekali-kali tidak menjadi jaminan bahwa pendapatan realnya juga akan meningkat dengan sepadan. Pertambahan penduduk hanya mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan

ekonomi, apabila perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli real (permintaan efektif) masyarakat secara menyeluruh. Barulah, dalam keadaan demikian maka akan terlaksana akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, sekaligus juga akan menimbulkan permintaan akan tenaga kerja. Kendala terhadap perkembangan tersebut oleh Malthus diungkapkan dalam teorinya mengenai ketidakmampuan untuk berkonsumsi secara memadai (*theory of underconsumption*). (Boediono, 2009)

Masalah penting dalam pembahasan Malthus yang menarik perhatian dan sampai sekarang masih relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang ialah segi institusi yang bersifat sosiologi-ekonomis. Dalam masyarakat di negara-negara maju, termasuk di kalangan cendekiawan, sering terdapat pandangan seolah-olah keterbelakangan dan kemacetan ekonomi di belahan dunia lain (Amerika Latin, Afrika, Asia) disebabkan oleh tabiat dan perilaku penduduk setempat, yaitu sikap memudahkan sesuatu, malas dan mempunyai ketergantungan pada alam yang sangat tinggi, keadaan sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia. (Boediono, 2009).

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Karl Max

Pola pendekatan dinamika (*pattern of dynamic approach*) yang menyangkut perkembangan masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang, bukanlah cara pandang yang baru timbul di zaman modern. Haluan pemikiran tersebut telah terkandung di dalam gagasan-gagasan pakar - pakar teori klasik. Pola pendekatan demikian lebih menonjol lagi dalam sistem pemikiran Karl Marx, yang dapat dianggap sebagai teori dinamika yang paling komprehensif. Dalam hubungan itu,

pandangan para pakar teori klasik dan Karl Marx dapat dimasukkan dalam kategori *grand theories* dan kadang – kadang sebagai *magnificent dynamics*. Karl Marx menyoroti banyak aspek dalam teorinya yang dikenal sebagai teori konflik. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, Marx menonjolkan pendeskripsian tentang perkembangan masyarakat dalam polanya yang sederhana hingga menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks dan dengan pembagian kerja yang ketat dalam masyarakat kapitalis. (Boediono, 2009).

Dalam gagasannya mengenai konsep materialisme historis, Marx mengungkapkan bahwa aktivitas produktif manusia merupakan kunci untuk menganalisis kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi substansi masyarakat kapitalis, yaitu bahwa seluruh masyarakat harus membuat diri mereka produktif dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terikat dalam produksi yang bersifat materi. Para kapitalis merupakan pihak yang memiliki posisi tawar tertinggi, sedangkan kaum buruh hanya dapat menjual tenaganya kepada majikan sebagai satu input dalam proses produksi. Maka, terjadilah besar-besaran terhadap kaum buruh. Pada masa itu modal merupakan kunci untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Sejalan dengan perkembangan teknologi, para pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi, modal yang diperolehnya. Menurut Marx, kemampuan kapitalis untuk mengakumulasikan modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakannya. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah merupakan

manifestasi dari jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. (Boediono, 2009).

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijabatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah dari pada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut terjembatani. Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagai besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan lebih tinggi, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan

untuk mengkonsumsi turun. Sebaliknya kecenderungan mengkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan. Dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung menggumpal (*kumulatif*). Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan mengkonsumsi. (Jhingan, 2010)

Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier K. Pengali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan mengkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti, bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya ialah $\Delta Y = K\Delta I$, dan $1-1/K$ mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi pengali $K = 1/1 - MPC$. Karena kecenderungan marginal mengkonsumsi turun, berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. Inilah secara singkat teori Keynes mengenai pekerjaan, (Jhingan, 2010)

Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam "*general theory*" -nya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrod, Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model – model

pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul “*Economic Possibilities for Our Grand Children*” Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu (i) kemampuan kita mengendalikan penduduk : (ii) kebulatan tekak menghindari perang dan perselisihan sipil: (iii) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, mempedomani hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan: dan (iv) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Sejah menyangkut kekhawatiran akan masa depan kapitalisme, Keynes bersifat Optimis Keynes mengsnggap kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan gaya adaptasi yang besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisnya (stagnasi jangka panjang) berdasarkan over-produksi umum, konsumsi rendah yang kronis dan merosotnys efisiensi marginal modal di masa depan. (Jhingan, 2010)

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

1. W.W. Rostow

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal Growth* pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhan ekonominya hanya dalam tiga tahap : tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus – menerus, (Boediono, 2009) Dalam hal prakondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses dimana masyarakat berkembang dari

suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap-tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel - variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi – kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat *unilinear* dan *universal*, serta dianggap bersifat permanen.

Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para pakar ekonomi menganggap bahwa teori pertumbuhan ini merupakan contoh terbaik dari apa diistilahkan ‘teori modernisasi’. (kuncoro M, .2000)

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa

dibedakan ke dalam 5 tahap:

1. Masyarakat tradisional (*The Traditional Society*),
2. Masyarakat Pra-Kondisi untuk periode Lepas Landas (*The Preconditions for Take Off*),
3. Proses Lepas Landas (*The Take Off*)
4. Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*)
5. Tingkat Konsumsi Tinggi (*High Mass Consumption*)

2. Harrod – Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod – Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam

jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod – Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). (Boediono, 2009)

Teori Harrod – Domar didasarkan pada asumsi :

- a. Perokonomian bersifat tertutup
- b. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan.
- c. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
- d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud di sini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Out Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y=C+I$).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod – Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = k = n \dots\dots\dots(2-1)$$

Dimana :

- g = *Growth* (tingkat pertumbuhan output)
 K = *Capital* (Tingkat pertumbuhan modal)
 n = Tingkat pertumbuhan angkatan Kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campurtangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

D. Produk Domestik Bruto (PDB)

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai perekonomian sedang berlangsung baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB)/*Gross Domestic Product* (GDP).

Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (*final*) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode, dalam *Gross Domestic Product* (GDP) terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. 46 selain itu, *Gross Domestic Product* (GDP) juga mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, 2007).

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDB yaitu (Case & Fair, 2008):

a. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir.

b. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang akhir selama satu periode tertentu.

c. Pendekatan Produksi

d. Pendekatan Produksi adalah metode menghitung pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara ini sendiri.

e. Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan produk domestik regional bruto yang relative tinggi tersebut belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini sangat bergantung kepada perkembangan jumlah penduduk. Jika pertumbuhan penduduk pertengahan tahun lebih tinggi dari pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto pada tahun lebih tinggi dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun yang sama, maka PDRB perkapitanya akan semakin kecil dan sebaliknya, bila pertumbuhan jumlah penduduk terjadi lebih lambat, maka PDRB perkapitanya akan semakin besar. PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

A. Teori Pengeluaran Pemerintah

Konsumsi atau pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro.

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program pengeluaran pemerintah

berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta (Suparmoko, 1998). Sedangkan pengeluaran dapat kita kelompokkan dalam dua golongan yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaranann Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari : belanja pegawai, yaitu untuk membiayaan gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan. Belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggara pemerintah sehari-hari , subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang. Belanja pemeliharaan, yaitu pengeluaran

untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik.

Belanja perjalanan, yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintah.

Pengeluaran rutin memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

Ø Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pengeluaran pembangunan. Ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain :

2. Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)

Berdasarkan pengalaman empiris dari negara negara maju (USA, Jerman, Jepang), wegner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Meskipun demikian, wegner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Kelemahan hukum wagner adalah

hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah yang menganggap sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi :

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} > \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

Ket :

GpC : Pengeluaran pemerintah perkapita

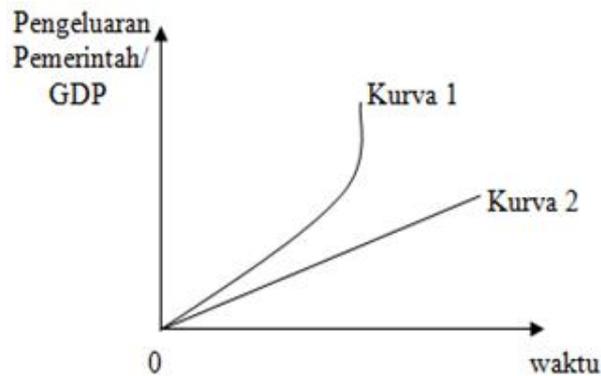
YpC : Produk atau Pendapatan Nasional per kapita

t : Indeks waktu

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar.

hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah ada 5 hal yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan

dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.



Gambar 2.1.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

sumber : Mangkoesobroto, 2011

Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

3. Teori Peacock dan Wiserman

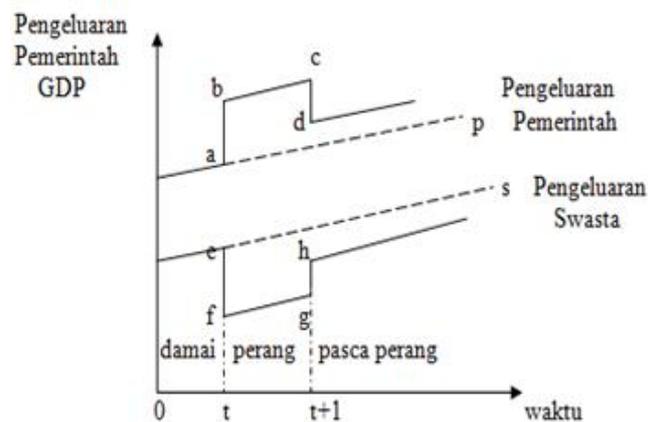
Teori peacock dan wiserman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan

pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut teori peacock dan Wiserman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkat penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah melakukan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain. Setelah perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pada tingkat sebelum adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah harus mengembalikan angsuran utang dan bunga pinjaman untuk membiayai perang, sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GDP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya.

Selain itu masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan Pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan

bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini :



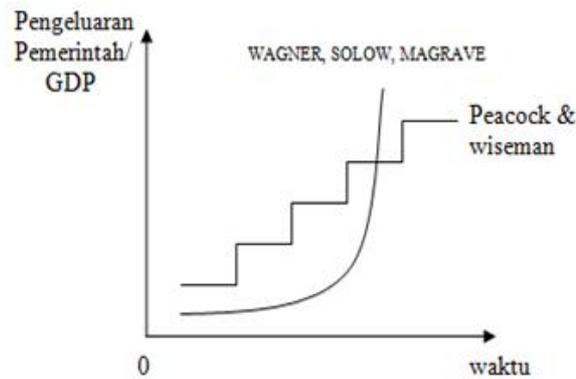
Gambar 2.1.2 Kurva Peacock dan Wiseman

Sumber : mangkoesobroto, 2001

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, Pengeluaran Pemerintah dalam presentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AP. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AB dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen BC. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke P. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Secara grafik, perkembangan Pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat

dalam pendapat Rostow dan Musgrave. Melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga yang dapat dilihat gambar di bawah ini:



Gambar 2.1.3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave

Sumber : mangkoesobroto, 2001

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Karena adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

2.2 Kebijakan Pemerintah (E Goverment Relations)

Istilah kebijakan atau yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sejak dari awal, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pembangunan daerah pinggiran. Pada pemerintah Presiden Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi, yaitu UU No 22/1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No 25/1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. UU No 22/1999 mendelegasikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah daerah dan membentuk proses politik daerah. UU No 25/1999 mendorong desentralisasi dengan memberikan pembagian sumberdaya fiskal kepada pemerintah daerah. Keadaan tersebut, terutama motivasi politis, tidak diragukan lagi mempengaruhi banyak aspek dalam otonomi daerah. Kedua UU di atas menegaskan adanya fungsi dan kewenangan pemerintah daerah yang lebih besar dibandingkan UU No 5/1975. Oleh karena itu, beberapa pengamat menyebut diterapkannya pendekatan *bing bang*, radikal, dalam struktur pemerintahan dan desentralisasi fiskal karena mengubah drastis pada pola hubungan pusat dan daerah (Mudrajad Kuncoro: 2014, Otonomi Daerah, 45).

Oleh sebab itu pada orde pemerintahan Presiden Jokowi membuat kebijakan tentang pembangunan berbasis pinggiran yang ditandai terwujudnya Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Pendapat beberapa ahli tentang kebijakan pemerintah diartikan sebagai berikut ini :

1. Friedrik (1963) Berpendapat Bahwa Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang

dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.

2. Menurut PBB: Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.
3. Lasswell (1970) Berpendapat Bahwa Kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices).
4. Carter V. Good (1959). Berpendapat Bahwa Kebijakan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai mekanisme politis, finansial, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran

tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu menyangkut kepentingan umum. Definisi Kebijakan pemerintah menurut para ahli sebagai berikut :

1. Thomas R. Dye mengatakan Kebijakan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003:41).
2. Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. (Soenarko, 2003:42)

Paparan diatas merupakan pengertian dari kebijakan pemerintah. Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia memerlukan beberapa kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan baik sektor infrastruktur maupun di sektor ekonomi. Pada sektor ekonomi pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan memperbaiki dan memajukan sektor ekonomi. Negara yang berkembang merupakan Negara yang dapat menstabilkan perekonomian, dan mengurangi tingkat inflasi.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn. Adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebutkan sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daro pada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issue* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Wiliam Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas sutu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974, Salesbury 1976, sandbach, 1980, Hogwood dan Gunn,1986) diantaranya:

1. Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;

2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media masa.
4. Menjangkau dampak yang amat luas.
5. Mempermasalahkan kekuasaan dan kebebasan dalam masyarakat
6. Menyangkut suatu persoalan yang fosionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Karakteristik para pejabat yang dipilih dan daingkat menempatkan masalah pada agenda publik banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah - masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung, dukungan untuk rezim

cenderung berdifungsi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, proram-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Perlu kita ketahui mengapa kita harus mengetahui serta memahami setiap kebijakn yang ada, karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, namun, banyak sekali hal-hal yang tersirak (kontekstual) yang tidak diketahui oleh public dalam menerapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk transformasi informasi kepada rakyat, maka haruslah setiap media yang ada bersifat independen atau tidak terpengaruhi oleh kekuasaan politik tertentu. Selain media sebagai alat, masyarakat berperan untuk dapat menganalisis setiap kebijakan dan mampu membantu menyusun kebijakan yang ada. Inilah 2 tujuan mempelajari kebijakan pemerintah.

Ada dua akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu : kebijakan yang berorientasi pada pelayanan public dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan

kebijakan yang meracuni public/kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah. Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; pembuatan peraturan UU, perencanaan kegiatan, aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah, maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.

2.2.1 Peraturan Kebencanaan

1. Bencana

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Defenisi ini menurut Internasional Strategy For Disaster Reduction (UN-ISDR-2002,24) bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia yang terjadi secara tiba-tiba, atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan

definisi bencana UN-ISDR yang sebagaimana disebutkan diatas, dapat digeneralisasikan untuk dapat disebut “bencana” harus dipenuhi beberapa kriteria/kondisi berikut :

- Ø Adanya peristiwa
 - Ø Terjadinya karena faktor atau karena ulah manusia
 - Ø Terjadinya secara tiba-tiba (sudden) akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan/bertahap(slow)
 - Ø Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial ekonomi, kerusakan lingkungan dan lainnya.
 - Ø Berada di luar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya
- Bencana erupsi Gunung Sinabung yang terjadi di tanah Karo dapat di katakan memenuhi beberapa kriteria/kondisi dari yang disebutkan

2. Bencana Alam

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam yang mengakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana alam dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan penyebabnya :

- Ø Bencana alam geologis
Disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi (gaya endogen). Termasuk bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung merapi, tsunami, tanah longsor atau gerakan tanah serta abrasi.
- Ø Bencana alam Klimatologis

Bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, suhu atau cuaca.

Contoh bencana alam klimatologis adalah banjir, badai, snging puting beliung, kekeringan, kebakaran alami hutan, serta banjir bandang.

Ø Bencana alam eksta-terestial

Bencana yang terjadi di luar angkasa disebabkan gaya ataupun energi dari luar bumi. Contohnya : hantaman/impact meteor.

Peristiwa yang dikategorikan sebagai bencana alam dan belakangan terjadi secara terus menerus di Sumatera Utara adalah erupsi gunung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, erupsi adalah letusan gunung berapi atau semburan sumber minyak dan uap panas dari dalam bumi.

Erupsi umumnya terjadi di saluran magma dan retakan di gunung yang sudah terbentuknya sebelumnya

(<http://www.diwarta.com>, 2015)

Regulasi Peraturan Dana Desa

Ø Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ø Peraturan Pemerintah No, 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Ø Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Ø PM DESA, PDT & TRANSMIGRASI No, 1 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasakan Hak Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa

- Ø PM DESA, PDT & TRANSMIGRASI NO.2 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- Ø PM DESA, PDT & TRANSMIGRASI NO. 3 TAHUN 2015 Tentang Pendampingan Desa
- Ø PM DESA, PDT & TRANSMIGRASI NO.4 TAHUN 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Ø PM DESA, PDT & TRANSMIGRASI NO. 5 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Ø PM DESA, PDT & TRANSMIGRASI NO. 6 TAHUN 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Ø PM DESA, PDT & TRANSMIGRASI NO. 21 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Prioritas, Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Sumber : PPID KEMKOMINFO

2.2.2 Kebijakan Dana Desa

Sumber-sumber pendapatan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan itu memutuskan bahwa adanya peraturan pemerintah tentang Dana Desa Berdasarkan Kementerian Desa, Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke Daerah dan Dana Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa melalui transfer APBD kabupaten/kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.

Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperlihatkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitannya geografisnya. Secara teknis pengalokasian Kabupaten/Kota ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara tertahap. (www.kemendes.go.id)

Pedoman dan peraturan perundang Dana Desa diatur secara rinci oleh menteri. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Desa tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 membahas tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2015 untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber APBN.

Lebih lanjut, mekanisme penggunaan Dana Desa berdasarkan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu : Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang

pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengguna Dana Desa dapat digunakan sebagai berikut (Novita 2017:20-21):

1. pemenuhan kebutuhan pasar, seperti pengembangan poskesehatan Desadan polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, dan pembinaan dan, pengelolaan pendidikan anak usia dini.
2. Penggunaan sarana dan prasarana Desa, diprioritaskan untuk mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pariwisata dan industri. Untuk mendukung program tersebut perlu dibangun atau dipeliharannya jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, sanitasi lingkungan, irigasi tersier, pengelaaan air bersih beskala desa, pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan pengembangan sarana dan prasaran produksi di Desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal, diantaranya meliputi pendirian dan pengembangan BUMDesa, pengembangan dan pengelolaan pasar Desa, Kios Desa, lumbung pangan desa, energi mandiri, tambahan perahu, pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, pengembangan Desa wisata, pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang bantuan, rumput laut, hutan milik desa, pengelolaan sampah.

Sementara itu, prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup (Novita 2017:22)

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa.
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM des, maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya.
3. Pembentukan dan peningkatan kapitas kader pemberdayaan masyarakat Desa
4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegel untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.
5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan ferakan hidup bersih dan sehat.
6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan kemasyarakatan.
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha tarif produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Model		

		Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
.	Herawati Anastasia situmorang Analisis Kondisi Ekonomi Masyarakat Pasca Erupsi Gunung Sinabung di desa Kutambelin Kecamatan Naman Teran kabupaten karo	Uji Partial Test (Uji Beda)	Kondisi sosial Ekonomi	kondisi kehidupan masyarakat dan strategi hidup rumah tangga masyarakat pasca erupsi Gunung Sinabung di Desa Kutambelin
.	Andi Kesuma sidabutar, yusak Dampak Usahatani Kentang Terhadap Usahatani Kentang (Kasus : Desa Kuta Rakyat, Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo	Uji Partial Test (Uji Beda)	Kondisi ekonomi dan pertanian	Kondisi sosial ekonomi di gunung sinabung di desa kuta rakyat mengakibatkan perubahan yang menurun terhadap luas lahan tanam dalam usaha tani
.	Napitupulu (2016), Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Pengembangan Wilayah Kecamatan Habinsaran	Deskriptif Kuantitatif	Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pengembangan wilayah	Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara

	Kabupaten Toba Samosir			Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa.
--	---------------------------	--	--	---

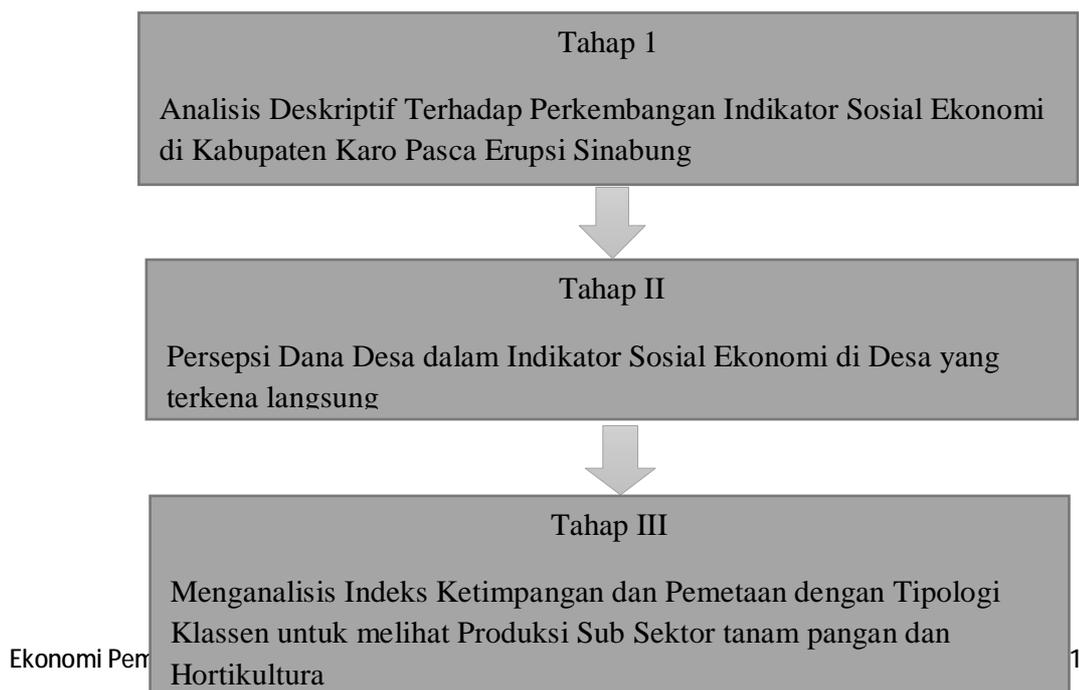
Penelitian Terdahului

2.4 Kerangka Penelitian

Adapun Kerangka Penelitian berdasarkan pada bencana dalam hal ini erupsi dari Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Dimana hal-hal yang berhubungan dengan perekonomian tersebut dapat dilihat dari sebelum dan sesudah terjadinya Bencana Alam erupsi Sinabung,

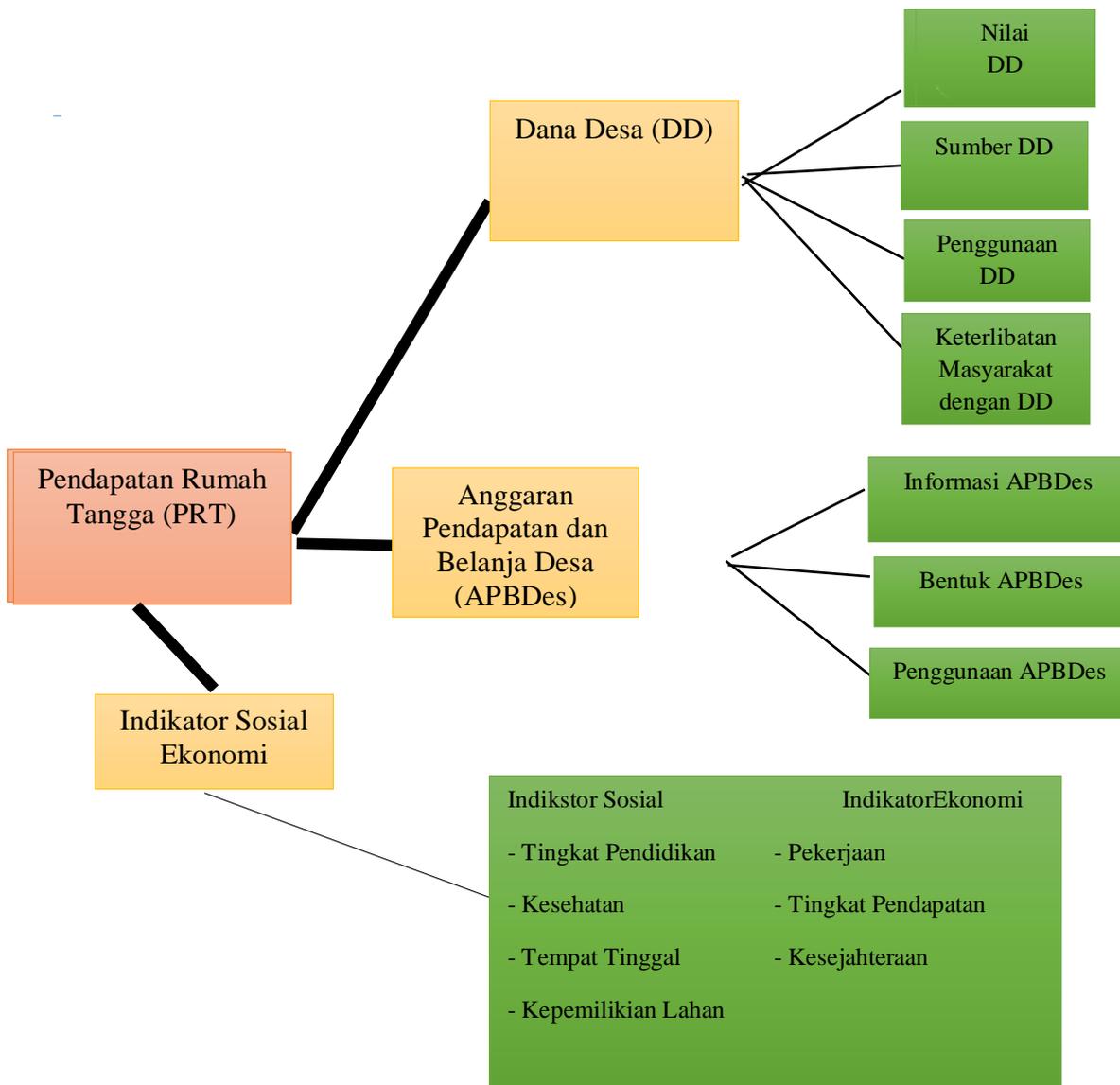
2.4.1 Kerangka Penelitian

**Gambar 2.2
Bagan Tahapan Penelitian**



1.4.2 Kerangka Model Penelitian Analisa Faktor yang Pendapatan Rumah
Tangga

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual Model I

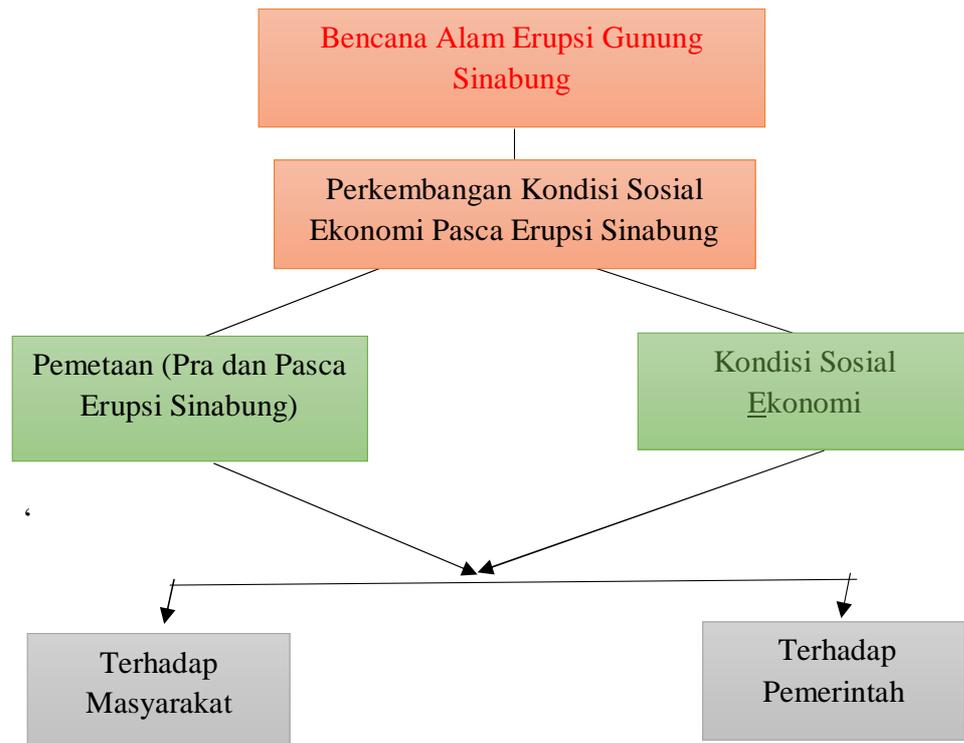


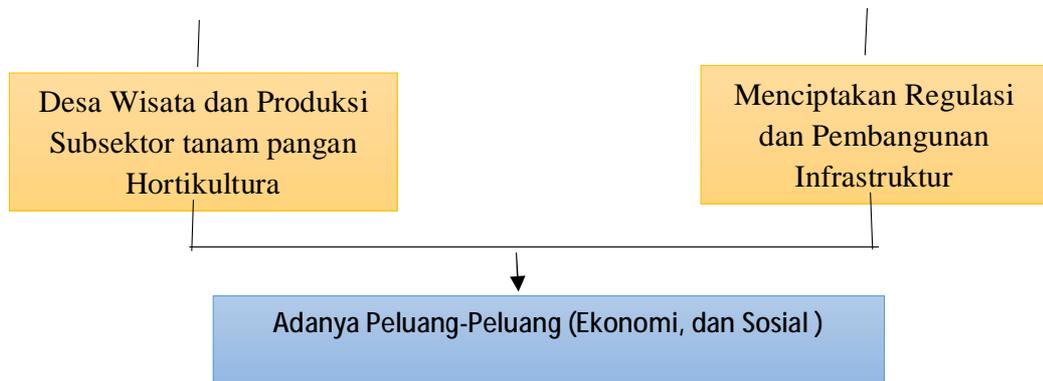
Dalam model ini Variabel Dana Desa (DD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Indikator Sosial Ekonomi merupakan Variabel Bebas yang mempengaruhi secara langsung erupsi sinabung terhadap Pendapatan Rumah Tangga di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Namentera, Tiganderket, Payung dan Simpang Empat, di Kabupaten Karo yang merupakan Variabel terikat.

2.4.3 Model II Kerangka Analisis Dampak Erupsi Gunung Sinabung

Gambar 2.4

Kerangka Konseptual Model II Dampak Erupsi Sinabung





(Kutipan sumber : (Prawidya Hariani Rs)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode Kualitatif. Kuncoro (2013:145) menjelaskan metode Kualitatif adalah data yang tidak dapat di ukur dalam skala numeric. Namun, karena dalam statistika sebuah data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya di kuantitatifkan agar dapat di proses lebih lanjut. Caranya adalah dengan mengklasifikasikan dalam bentuk kategori.

Secara lebih spesifik, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis Indikator Sosial Ekonomi.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat berhubungan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah : Dana Desa (DD), Indikator Sosial Ekonomi (ISE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Erupsi Gunung Sinabung (EGS), Produk Domestik Bruto (PDB), Serta Pendapatan Rumah Tangga (PRT). Sehingga definisi operasional dari penelitian ini ialah :

Tabel 3.1

Definisi Operasional

Indikator Sosial	Definisi Operasional	Sumber Data
<ul style="list-style-type: none"> Ø PRT (Pendapatan Rumah Tangga) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø Penghasilan yang diperoleh Seluruh anggota Rumah Tangga 	<p>Responden</p>
<ul style="list-style-type: none"> DD (Dana Desa) Ø Besaran transfer Dana Desa Ø Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Ø Dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota 	<p>Kementerian Keuangan</p>
<p>Indikator Sosial Ekonomi</p>	<p>Indikator Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Tingkat Pendidikan Ø Kesehatan Ø Tempat Tinggal Ø Kepemilikan Lahan - Kesejahteraan <p>Indikator Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Pekerjaan Ø Tingkat Pendapatan Ø Kesejahteraan 	<p>Bps Kabupaten Karo (www.karokab.go.id, 2015)</p>

Erupsi Gunung Sinabung	Menurut Mac Donald Erupsi Gunung Berapi adalah letusan gunung berapi atau pun semburan minyak dan uap dari dalam perut bumi. Hal ini terjadi karena adanya pergerakan atau aktifitas dari magma dalam perut bumi yang berusaha keluar ke permukaan bumi	BPS https://bps.sumut.go.id
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	Menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto adalah sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Ada tiga pendekatan yaitu (1) Pendekatan Produksi, (2) Pendekatan Pendapatan (3) Pendekatan Peneluaran	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id

3.3 Lokasi dan waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, akan dilaksanakan di kabupaten karo dengan melihat 4 kecamatan yaitu Kecamatan Namanteran, Tiganderket, Payung dan Simpang Empat, yang terkena langsung erupsi.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu yang di rencanakan dari Penelitian ini dilaksanakan selama pada bulan Desember 2018, sampai dengan Februari 2019.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penulisan penelitian ini adalah data Kualitatif dan data kuantitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Pada umumnya data kualitatif yang bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. (Kuncoro,2013).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini data Primer dan sekunder yang merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan observasi lapangan dan menggunakan data dari berbagai sumber yang terkait.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek Penelitian. (Kuncoro, 2013).

Populasi yang digunakan adalah semua Rumah Tangga yang berada di Jalur Hijau di Kabupaten Karo di karenakan sebagian sudah ada

yang pindah mengakibatkan data belum komplit jadi, data tidak terdaftar secara resmi.

3.5.2 Sampel

Dalam penelitian ini sampelnya adalah jumlah Rumah Tangga di 4 Kecamatan yang terkena langsung erupsi Gunung Sinabung, Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *non probability sampling*. *Non Probability Sampling* adalah penggunaan bagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi atau untuk menginformasikan tentang proses yang bermakna di luar kasus-kasus tertentu. Individu atau situs yang teliti. Jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini 50 Sampel. Karena menggunakan *Judgement Sampling (Purposive Sampling)* adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.

Fakta menunjukkan Dari Hasil Riset, Kenapa Memilih *Nonprobability Sampling* ? Karena Penduduk yang tadinya banyak yang sudah pindah, Sehingga tidak tercatat secara resmi, data Publikasi dari BPS tidak ada berkurangnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Henke & Reitsh (Kuncoro, 2013) Pengumpulan data umumnya berasal dari Data *internal* atau *Eksternal* dan data Primer atau data Sekunder. Data *internal* berasal dari organisasi tersebut ataupun dari *eksternal*

yang berasal dari luar organisasi. Sedangkan, data Primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Di lain pihak, data sekunder biasa telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan publikasikan kepada masyarakat data, (Kuncoro, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data yang berkaitan dengan Dana Desa dari kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo dan melakukan observasi lapangan di dua Desa yaitu Desa Sibeganding Kecamatan simpang 4, Kecamatan Namanteran Desa kutabelin, Kabupaten Karo Sumatera Utara. Mengentri data yang diperoleh dari berbagai sumber atau pun observasi guna melihat perkembangan dan pertumbuhansubjek yang diteliti serta melakukan analisis. Dan memberikan Quesioner sederhana kepada penduduk sekitar.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis yang digunakan pada pembahasan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pembuktian dengan menggambarkan keadaan yang terjadi secara umum.

3.7.2 Analisis Faktor

A. Model Analisis Faktor

Secara matematis, analisis faktor hampir sama dengan regresi linier berganda, yaitu bahwa setiap variabel dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari faktor yang mendasari (*underlying factor*), jumlah (*amount*), yang tercakup dalam analisis disebut *communality*. Kovariansi antar variabel yang diuraikan, dinyatakan dalam *commons factors* yang sedikit jumlahnya ditambah dengan faktor yang unik untuk setiap variabel. Faktor-faktor ini tidak secara jelas terlihat (*not overtly observed*).

Tujuan dari analisis faktor adalah untuk menggambarkan hubungan-hubungan kovarian antara beberapa variabel yang mendasari tetapi tidak teramati, kuantitas random yang disebut faktor, vector random teramati X dengan P komponen, memiliki rata-rata p dan matrik kovarian.

B. Metode Analisis Faktor

Metode analisis faktor merupakan jenis analisis yang digunakan untuk mengenali dimensi-dimensi pokok atau keteraturan dari sebuah fenomena. Tujuan umum dari analisis faktor adalah untuk meringkas kandungan informasi variabel dalam jumlah yang besar menjadi sebuah faktor yang lebih kecil. Analisis faktor dimulai dari menyusun suatu kelompok variabel baru berdasarkan hubungan sebagaimana ditunjukkan matriks korelasi. Pendekatan yang digunakan dalam analisis faktor adalah *principal component analysis*, yaitu analisis yang mentransformasikan sejumlah variabel ke dalam suatu variabel komposit baru,

atau komponen utama (*principal component*) yang tidak berkorelasi satu sama lain. (Kuncoro,2013)

Analisis faktor digunakan untuk penelitian awal di mana faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel belum diidentifikasi secara baik (*explanatory research*). Selain itu, analisis faktor juga dapat digunakan untuk menguji validitas suatu rangkaian kuesioner. Sebagai gambaran, jika suatu indikator tidak mengelompok kepada variabelnya, tetapi malah mengelompok ke variabel yang lain, berarti indikator tersebut tidak valid.

Ghozali menjelaskan bahwa asumsi analisis faktor menghendaki bahwa matrik data harus memiliki korelasi yang cukup agar dapat dilakukan analisis faktor. Jika berdasarkan data visual tidak ada nilai korelasi yang di atas 0,30, maka analisis faktor tidak dapat dilakukan. Sebelum memasuki analisis faktor, lebih dahulu melakukan uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang layak dan baik digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat menggunakan uji normal kolmogorov Smirnov. Jika $Sig > 0,005$ maka data berdistribusi normal namun sebaliknya jika $Sig < 0,005$ maka data berdistribusi tidak normal. Proses utama analisis faktor meliputi hal-hal berikut :

A. Uji Determinant of Correlation Matrix

Matrix Korelasi dikatakan antara variabel saling terkait apabila determinan bernilai mendekati nilai 0. Hasil perhitungan menunjukkan nilai *Uji Determinant of Correlation Matrix* sebesar 0,06. Nilai ini

mendekati 0, dengan mendekati matrik korelasi antara variabel saling terkait.

B. Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling (KMO)

Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling (KMO) adalah Indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi parsialnya. Jika jumlah kuadrat koefisien korelasi parsial di antara seluruh pasangan variabel bernilai kecil jika dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi, maka akan menghasilkan nilai KMO mendekati 1. Nilai KMO dianggap mencukupi jika lebih dari 0,5.

C. Bartlett Test of Sphericity

Uji Bartlett Test of Sphericity merupakan uji Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bahwa variabel-variabel tidak saling berkorelasi dalam populasi. Dengan kata lain, matriks korelasi populasi merupakan matriks identitas, setiap variabel berkorelasi dengan dirinya sendiri secara sempurna dengan ($r = 1$) akan tetapi sama sekali tidak berkorelasi dengan lainnya ($r = 0$). Uji Bartlett bertujuan untuk mengetahui apakah matrik korelasi yang terbentuk itu berbentuk matriks identitas atau bukan. Dalam analisis faktor keterkaitan antar variabel sangat diperlukan, karena tujuan dari analisis ini adalah menghubungkan suatu kumpulan variabel agar menjadi satu faktor saja. Bila matriks korelasi yang berbentuk adalah matriks identitas, berarti tidak ada korelasi antar variabel, sehingga analisis

faktor tidak dapat dilakukan. Pengelompokan dilakukan dengan mengukur korelasi sekumpulan variable dan selanjutnya menempatkan variabel-variabel yang berkorelasi tinggi dalam satu faktor, dan variabel-variabel lain yang mempunyai korelasi relative lebih rendah ditempatkan pada factor lain. Analisis faktor digunakan dalam situasi :

1. Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari atau faktor, yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel.
2. Mengenali dan mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak berkorelasi (*independen*) yang lebih sedikit jumlahnya untuk menggantikan suatu set asli yang saling berkorelasi di dalam analisis multivariate selanjutnya, misalnya analisis regresi ganda dan analisis diskriminan.
3. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan di dalam analisis multivariate selanjutnya.

Prinsip utama analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi-asumsi yang terkait dengan metode statistik korelasi :

- a. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat.
- b. Besar korelasi persial, korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain.
- c. Pengujian sebuah matrik korelasi diukur dengan besar Barlett Test Of Sphericity atau dengan Measure Sampling Adequacy (MSA).

Setelah sampel didapat dan uji asumsi terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisis faktor. Proses tersebut meliputi :

- a. Menguji variabel apa saja yang akan dianalisis
- b. Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan menggunakan Barlett Test of Sphericity dan MSA.
- c. Melakukan proses inti analisis faktor, yakni faktoring, atau menurunkan satu atau lebih faktor dari variabel-variabel yang telah lolos pada uji variabel sebelumnya.
- d. Melakukan proses faktor rotasi terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk ke dalam faktor tertentu.
- e. Interpretasi atau faktor yang telah terbentuk, yang dianggap bisa mewakili variabel-variabel anggota faktor tersebut.
- f. Validasi atau hasil faktor untuk mengetahui apakah faktor yang terbentuk telah valid.

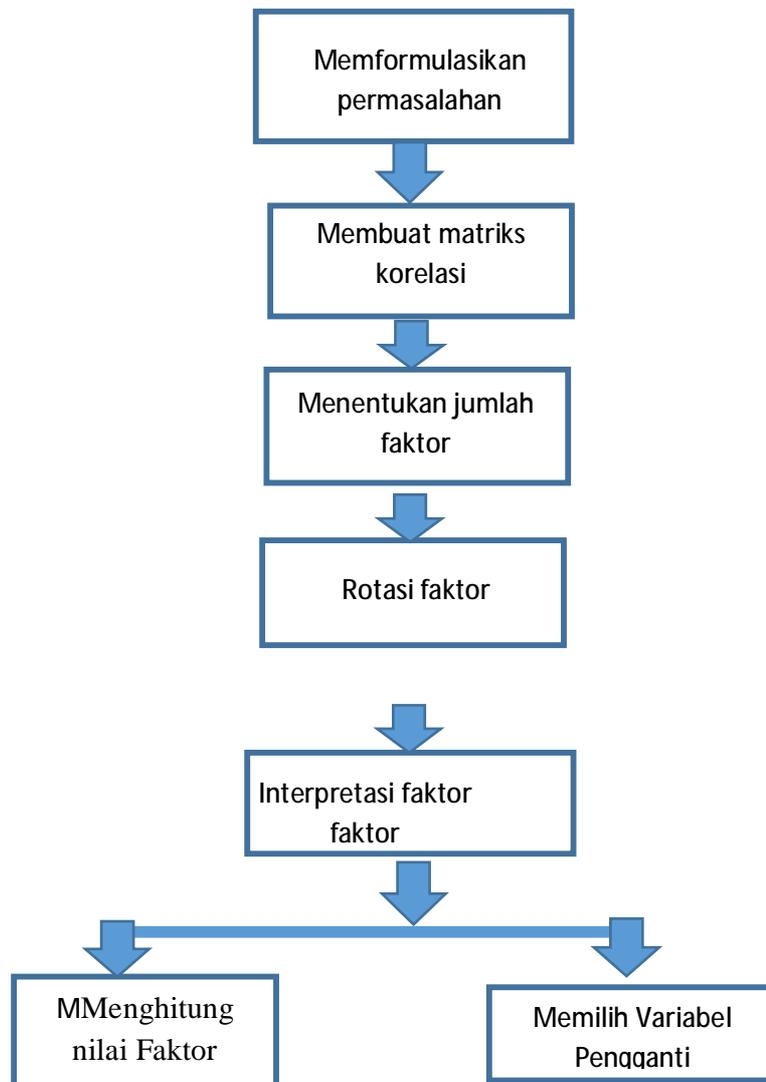
Tahap pertama dalam analisis faktor adalah dengan menilai mana saja variabel yang dianggap layak untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan semua variable yang ada, dan kemudian pada variable – variable tersebut dikenakan sejumlah pengujian.

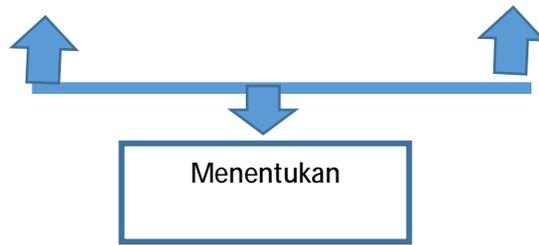
Logika pengujian adalah jika sebuah variable memang mempunyai kecendrungan mengelompokkan atau membentuk sebuah faktor, variable tersebut akan mempunyai korelasi yang cukup tinggi

dengan variable. Sebaliknya, variable dengan korelasi lemah dengan variable yang lain, akan cenderung tidak akan mengelompokkan dan faktor tertentu.

Langkah langkah dalam analisis faktor dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Bagan Analisis Faktor





3.8 Tahapan Analisis

Berdasarkan bagan di atas, secara garis besar analisis faktor dilakukan sebagai berikut:

1. Membuat Matriks Korelasi

Proses analisis didasarkan pada matriks korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, untuk memperoleh analisis faktor yang tepat semua variabel-variabelnya harus berkorelasi. Untuk menguji ketetapan dalam model faktor, uji statistik yang digunakan adalah test of sphericity dan kaiser-meyer-olkin (KMO).

2. Metode analisis faktor

Metode atau teknik analisis faktor yang digunakan untuk ekstraksi dalam analisis faktor adalah principal component analysis (PCA), yaitu merupakan pendekatan untuk analisis faktor yang menekankan pada pertimbangan total variabel dalam data.

3. Penentuan Jumlah faktor

Penentuan jumlah faktor yang diperlukan untuk mewakili variabel-variabel yang akan dianalisis didasarkan pada besarnya nilai eigen value serta prosentasi total varian.

Pada analisis ini jumlah faktor sebelum penelitian ditentukan sebanyak tujuh faktor berdasarkan apriori dan hanya berlaku pada pembahasan sebelum penelitian. Setelah penelitian dilaksanakan untuk analisis selanjutnya didasarkan pada hasil analisis statistik dengan principal component analisis (PCA). Hanya faktor yang memiliki eigen value sama dengan atau lebih besar dari 1 (satu) yang dipertahankan dalam model analisi faktor, sedangkan yang lainnya dikeluarkan dari model.

4. Rotasi Faktor

Hasil dari ekstraksi faktor dalam matrik faktor mengindikasikan hubungan antara faktor dan variabel individual namun dalam faktor-faktor tersebut terdapat banyak variabel yang berkorelasi, sehingga sulit diinterpretasikan. Melalui rotasi faktor matrik, matrik faktor ditransformasi ke dalam matrik yang lebih sederhana sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Rotasi faktor dengan menggunakan prosedur varimax.

5. Interpretasi faktor

Interpretasi faktor dilakukan dengan mengklasifikasikan variabel yang mempunyai faktor loading yang tinggi ke dalam faktor yang bersangkutan. Untuk interpretasi hasil penelitian ini faktor loading

minimum 0,50 variabel dengan faktor loading kurang dari 0,50 dikeluarkan dari model.

6. Model fit (ketepatan mode)

Tahap akhir dari analisis faktor adalah untuk mengetahui ketepatan dalam memilih teknik analisis faktor (*principal component analysis*). Untuk mengetahuinya dengan melihat jumlah residual (perbedaan) antara korelasi yang diamati dengan korelasi yang direproduksi, semakin kecil prosentasenya maka semakin tepat penentuan teknik tersebut.

3.9 Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, sub sektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Dalam hal ini analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor.

Tipologi Klassen juga merupakan salah alat analisis ekonomi regional, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada pengertian ini, Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah dengan

PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau PDB per kapita secara nasional.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, pengguna analisis tipologi klassen akan mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat membuat prioritas kebijakan daerah berdasarkan keunggulan sektor, sub sektor, usaha atau komoditi daerah yang merupakan hasil analisis tipologi klassen.
2. Dapat menentukan prioritas kebijakan suatu daerah berdasarkan posisi perekonomian yang dimiliki terhadap perekonomian nasional atau pun daerah.
3. Dapat menilai suatu daerah baik dari segi daerah maupun sektoral.

Jerry G. Williamson (1995) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Williamson menggunakan *Williamson Index* (Indeks Williamson) untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson mengukur PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas bahwa yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah

bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok. Formulasi Indeks Williamson secara Statistik adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i}{n}}}{Y}, 0 < IW < 1$$

Dimana :

IW = Indeks Williamson

Y_i = pendapatan per kapita daerah i

Y = pendapatan per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah Penduduk seluruh Daerah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi di Kabupaten Karo Pasca erupsi Sinabung

4.1.1 Gambaran Umum Geografi Kabupaten Karo

a. Letak

Kabupaten Karo disebut juga dengan nama Kabupaten Tanah Karo, terletak di Provinsi Sumatera Utara, dengan ibu kota Kabupatennya Kabanjahe. Kabupaten ini memiliki Luas wilayah 2.127,25 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 400.000 jiwa. Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Karo, berada di Jajaran Bukit Barisan yang merupakan salah satu daerah hulu sungai. Kota Kabanjahe berjarak sejauh 77 km dari Kota Medan Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Karo berada diantara 2° 50' - 3° 19° Lintang Utara dan 97° 55' - 98° 38' Bujur Timur dengan Luas 2.127,25 Km² atau 2,97 persen dari Sumatera Utara. Sebagian besar Wilayah Kabupaten Karo merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 600 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut. Karena berada diketinggian tersebut, Kabupaten ini mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu berkisaran antara 16 sampai 17°C. Dan Secara geografis Kabupaten Karo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan Samosir

Di Wilayah Kabupaten Karo ini memiliki udara yang sangat sejuk dengan suhu 13 – 26 C dan dengan kelembapan udara rata – rata 89, serta curah hujan rata – rata 1000 mm tahun, sehingga berciri khas sebagai daerah penghasil buah dan sayuran (Hortikultura) sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung. Dataran tinggi Karo terlihat bisa ditemukan Indahnya alam pegunungan, dan bisa juga menikmati keindahan. Di Kabupaten Karo terdapat dua gunung berapi aktif Gunung Toba (Pusuk Buhit) dan gunung Sibayak gunung ini juga sering menjadi tempat dakian para pendaki dan pencinta gunung berapi. Gunung berapi Sibayak berlokasi di atas ketinggian 2.172 meter dari permukaan laut. Orang suku Karo menyebut gunung Sibayak dengan sebutan ‘Gunung Raja’ menurut pengertian nenek moyang dari suku Karo tersebut. Berikut Gambaran peta Kabupaten Karo secara geografi dapat di lihat pada gambar 4.1:

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Karo Per Kecamatan



Sumber : www.KaroKab.go.id

Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan Dan Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di
Kabupaten Karo

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah
Barusjahe	19	128.04
Berastagi	10	30.5
Dolat Rayat	7	32.25
Juhar	25	218.56
Kabanjahe	13	44.85
KutaBuluh	16	195.7
Laubaleng	15	262.6
Mardingding	12	267.11
Merdeka	9	44.17
Merek	19	125.51
Munte	22	125.64
Naman Teran	14	87.82
Payung	8	47.24
Simpang Empat	17	93.48
Tiga Binanga	19	160.38
Tiganderket	17	86.76
Tiganpanah	26	186.84
Total	269	

Sumber : www.KaroKab.go.id

Berdasarkan tabel 4.1 diatas kita bisa melihat jumlah Kecamatan dan luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Karo pada tabel ini menunjukkan jumlah total

Kecamatan berjumlah 17 Kecamatan , 10 Kelurahan tersebar di 3 Kecamatan, 5 Kecamatan Kabanjaha, 4di Kecamatan Berastagi, dan 1 di Kecamatan Tiga Binanga dan 269 desa dan total luas wilayah 2.127,00km².

4.1.2 Kondisi Iklim dan Topografi

a. Topografi

di tinjau dari kondisi topografinya, Wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi bulit barisan dengan evelasi terendah + 140 m di atas permukaan laut (Mardingding) dan yang tertinggi ialah + 2.451 meter di atas permukaan laut (Gunung Sinabung). Daerah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondisi topografi yang berbukti dan begelombang, maka di wilayahnya ini ditemui banyak lembah-lembah dan alur-alur sungai yang dalam lereng-lereng bukit yang curam/terjal sebagian besar (90%) wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian/elevasi + 140 m s/d 1400 m diatas permukaan air laut.

b. Iklim

kabupaten Karo beriklim tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim Hujan Pertama mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Januari dan musim kedua pada bulan Maret sampai bulan Mei, sedangkan musim Kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni, Juli

Curah hujan di Kabupaten Karo pada tahun 2015 tertinggi pada bulan Oktober sebesar 188,5 mm dan terendah pada bulan Agustus sebesar 20 mm sedangkan hari hujan tertinggi pada bulan Oktober dan November sebanyak 22 hari dan terendah pada bulan Maret sebanyak 4 hari. Suhu udara berkisaran antara 15,5 C s/d 23,2 C dengan Kelembapan udara rata-rata setinggi 89,82 %.

Tabel 4.2

**Rata-Rata Jumlah Hujan dan Curah Setiap Bulan
Di Kabupaten Karo Pada Tahun 2011-2015**

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	
Bulan	Curah Hujan (mm)					
Januari	118	132	275	144	202	
Februari	145	72	324	6	18	
Maret	191	121	78	25	87	
April	181	64	103	446	272	
Mei	68	54	25	178	204	
Juni	85	49	99	86	78	
Juli	12	85	18	32	77	
Agustus	183	242	58	139	181	
September	42	21	42	205	190	
Oktober	104	217	254	183	382	
November	201	471	265	274	273	
Desember	80	285	308	156	224	
Jumlah Bulan Basah	7	6	6	8	8	7
Jumlah Bulan Kering	2	3	4	3	1	2,6

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada bulan Oktober, November dan Desember. Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Karo termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim Kemarau dan musim hujan. Musim Kemarau dan musim hujan biasanya di tandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

c. Luas Wilayah

Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 2.127,25 km² dengan jumlah penduduk 393.776 jiwa yang terbagi di 17 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 259 Desa, 10 Kelurahan tersebar di 3 Kecamatan, 5 di Kecamatan Kabanjahe, 4 di Kecamatan Berastagi, dan 1 di Kecamatan Tiga Binanga.

Berikut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo tentang Luas Wilayah Kabupaten Karo Per Kecamatan pada tahun 2013 :

Tabel 4.3

Luas dan Tinggi Wilayah di Kabupaten Karo Per Kecamatan Tahun 2013

Kecamatan	Luas	Tinggi
Mardinding	267.11	270-560
Laubaleng	252.6	200-520
Tigabinanga	160.38	450-750
Juhar	218.56	650-1.030
Munte	125.64	750-1.250
Kutabuluh	195.7	600-1.100
Payung	47.24	500-1.500
Tiganderket	86.76	500-1..500
Simpang Empat	93.48	700-1.420
Naman Teran	87.82	700-1.420
Merdeka	44.17	1.000-1.400
Kabanjahe	44.65	1.000-1.270
Berastagi	30.5	1.200-1.300
TigaPanah	186.84	1-100-1.350
Dolat Rayat	32.25	1.200-1.420
Merek	125.51	900-927

Barusjahe	128.04	1.200-1.400
Karo	2127.25	

Sumber : Kabupaten Karo Dalam Angka 2013

Pada tabel 4.2 di atas yang bersumber pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo Luas dan Tinggi Wilayah Per Kecamatan dapat di lihat bahwa, wilayah Kecamatan terluas di Kabupaten Karo adalah Kecamatan Mardinding 267.11 km². serta Kecamatan terkecil dengan luas wilayah 30.5 km² ialah Kecamatan Berastagi.

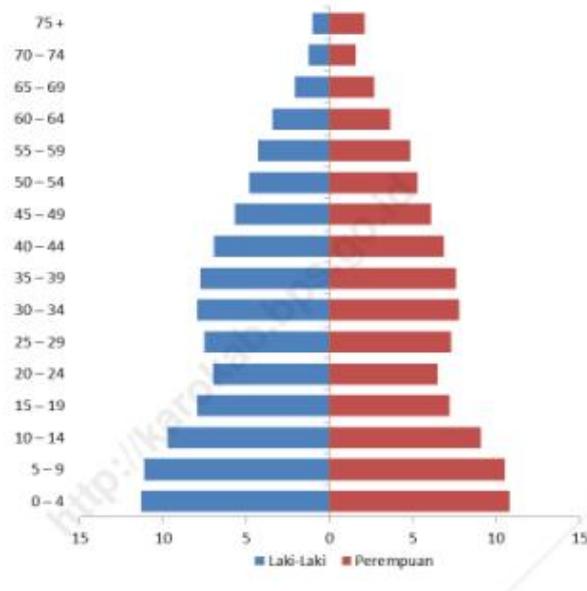
4.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Karo

a. jumlah penduduk

Hasil sensus tahun 2010 penduduk Kabupaten Karo berjumlah 350.960 jiwa. Pada petengahan tahun 2016, menurut, proyeksi penduduk sebesar 396.598 yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 km², kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 186 jiwa/km² Laju Pertumbuhan Penduduk Karo Tahun 2011-2016 adalah sebesar 2,48 persen per tahun, pada tahun 2016 di Kabupaten Karo Penduduk laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Laki-laki berjumlah 196.898 jiwa dan perempuan berjumlah 199.700 jiwa. Sex rasionya sebesar 98,60. Selanjutnya dengan melihat jumlah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas maka diperoleh rasio ketergantungan sebesar 57,88 yang berarti setiap seratus orang usia produktif menanggung 58 orang dari usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Beban tanggung anak usia produktif sebesar 50 dan beban tanggungan lanjut usia bagi penduduk usia produktif. Berdasarkan hasil SUSENAS. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 82,25persen tingkat pengangguran sebesar 2,23 persen.

Grafik 4.1 Piramida Kabupaten Karo

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : BPS Karo (www.Karo.bps.com)

Dari grafik 4.1 dapat di lihat bahwa jumlah penduduk di usia 0-9 tahun banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan sama jumlahnya, sedangkan pada kelompok usia 55-75 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Sedang pada kelompok usia produktif, jumlah pendudukperempuan dan laki-laki berjumlah sama. Dari grafik ini juga dapat kita lihat bahwasanya kelompok usia produktif lebih banyak menanggung beban anak-anak dibandingkan dengan beban lanjut usia.

b. Tingkat Kepadatan Penduduk

Kabupaten Karo dengan jumlah Penduduk 399.494 jiwa (2017) dengan kepadatan Penduduk 187 jiwa/km² . penyebaran penduduk antar Kecamatan masih

timpang, sehingga kepadatan untuk masing-masing Kecamatan belum merata, kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah perkotaan, ketidak merataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan, dan keamanan, oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah, kota kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai, faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (imigrasi), penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi pada perkotaan, Kecamatan Kabanjahe yang memiliki luas 44,65 km² dari luas Kabupaten Karo yang merupakan Kecamatan terpadat di Kabupaten Karo pada tahun 2010 , kepadatan penduduk Kecamatan Kabanjahe 64.746 jiwa, yang terbagi atas 13 desa/kelurahan, selanjutnya, Kecamatan Berastagi yang luas nya sebesar 30,50 km² , dan sekitar 43.500 jiwa penduduk terbagi atas 9 desa/kelurahan, dan Kecamatan Tiga Panah sebagai Kecamatan terpadat ketiga, dengan 30.000 jiwa 22 desa/kelurahan setiap Kilometer persegi wilayah Kecamatan tersebut.

c. jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan

Jumlah penduduk di Kabupaten Karo dari tahun ke tahun yang tersebar pada seluruh Kecamatan, pada Gambar yang telah di beri tanda warna , dimana pada

Kecamatan tersebut telah terkena langsung dampak dari Erupsi Gunung Sinabung letusan – letusan dan luncuran awan panas terkena muntahan langsung lahar panas kemudian debu vulkanik tersebut menimbulkan seperti rumah dan lahan tanaman pertanian, buah dan sayuran mengalami kerusakan saat akan di panen. Berikut pada tabel 4.2 dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Karo dari tahun 2010 sampai dengan 2016 per Kecamatan.

Tabel 4.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Karo per Kecamatan Tahun
2010 – 2016

Wilayah Kecamatan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mardingding	17 062	17 222	17 445	17 684	18 601	18 940	19 281
Laubaleng	17 713	17 879	18 110	18 359	19 391	19 766	20 099
Tigabinanga	19 900	20 086	20 346	20 626	21 329	21 763	22 108
Juhar	13 244	13 368	13 540	13 726	13 877	14 090	14 384
Munte	19 686	19 870	20 127	20 404	20 672	20 949	21 428
Kutabuluh	10 586	10 685	10 823	10 972	11 124	11 327	11 531
Payung	10 837	10 938	11 079	11 232	11 601	11 812	12 024
Tiganderket	13 178	13 301	13 474	13 659	13 757	14 078	14 260
Simpang Empat	19 015	19 192	19 440	19 707	20 009	20 373	20 739
Naman Teran	12 796	12 916	13 083	13 263	13 951	13 985	14 460
Merdeka	13 310	13 434	13 607	13 794	15 158	15 244	15 712
Kabanjahe	63 326	63 918	64 746	65 635	70 890	72 246	73 479
Berastagi	42 541	42 939	43 494	44 091	48 050	48 975	49 805
Tiganpanah	29 319	29 593	29 976	30 388	32 500	33 207	33 687

Dolat Rakyat	8 296	18 223	18 458	18 712	19 655	20 109	20 373
Merek	18 054	8 374	8 482	8 599	9 047	9 212	9 378
Barusjahe	22 097	22 304	22 593	22 904	23 010	23 515	23 850
Karo	350 960	354 242	358 823	363 755	382 622	389 591	396 598

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak penduduknya yakni Kecamatan Kabanjahe sebagai urutan pertama pada tahun 2016 sebanyak 73 479 orang, Selanjutnya Kecamatan Berastagi mencapai 49 805 orang dan selanjutnya adalah Kecamatan Tiganpanah sebesar 33 687 orang. Dan yang paling sedikit jumlah penduduknya atau yang paling rendah diantaranya adalah Kecamatan Dolat Rakyat hanya mencapai 9 378 orang. Selanjutnya yakni Kecamatan Kutabuluh hanya 11 531 orang. Selanjutnya yang terendah adalah Kecamatan Payung hanya mencapai 12 024 orang. Kecamatan yang terendah ini (Payung) Kecamatan sebagai daerah yang terkena dampak langsung dari semburan abu vulkanik.

4.1.4 Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Karo pada tahun 2015 adalah 446 orang, yang terdiri dari 1477 tenaga kerja laki-laki dan 644 perempuan. Sebagian besar merupakan tamatan SLTA ke atas. Dari seluruh pencari kerja yang terdaftar tersebut, sebanyak 95 orang sudah ditempatkan, yang terdiri dari 34 orang laki-laki dan 39 orang perempuan. Selama tahun 2015, di Kabupaten Karo. Jumlah Penduduk Pencari Kerja menurut Jenis Kelamin di tiap Kecamatan dan pendidikan di dominasi, dimana pada tahun 2013-2015, seperti tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.5

**Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Karo Menurut Kecamatan dan Pendidikan 2013-2015**

Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja SD,SMP, SMA dan D3/S1		
	2013	2014	2015
Mardingding	34	39	17
Laubaleng	73	44	28
Tigabinanga	77	31	28
Juhar	38	25	9
Munte	95	21	30
Kutabuluh	16	25	5
Payung	39	38	21
Tiganderket	48	27	22
Simpang Empat	79	47	32
Naman Teran	25	51	10
Merdeka	36	28	14
Kabanjahe	485	61	95
Berastagi	130	44	49
TigaPanah	107	57	40
Dolat Rakyat	30	27	2

Merek	68	44	15
Barusjahe	97	35	29
Karo	1 477	644	446

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat, Jumlah pencari Kerja yang terdaftar di dinas tenaga kerjaan Kabupaten Karo yang paling banyak dengan urutan 3 besar, yakni Kecamatan Kabanjahe Sebagai ibukota Kabupaten berada pada urutan pertama tahun 2015 sebanyak 95 orang, Kemudian diikuti Kecamatan Berastagi mencapai 49 orang dan urutan Ketiga adalah Kecamatan Tiganpanah sebesar 40 orang. Sebaliknya yang paling sedikit pencari kerja atau masuk 3 terendah adalah Kecamatan Dolat Rakyat hanya mencapai 2 orang, diikuti urutan terendah kedua yakni Kecamatan Kutabuluh 5 orang. Kemudian yang masuk urutan terendah ketiga adalah Kecamatan Juhar 9 orang.

a. Potensi Wilayah Kabupaten Karo

Indikator ekonomi dapat dilihat pada data untuk pertumbuhan ekonomi secara umum dan pertumbuhan sektoral dari setiap sektor ekonomi yang ada dalam data PDRB Kabupaten Karo. Secara umum artinya pertumbuhan ekonomi total sektoral, disebut pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo selama 6 tahun terakhir 2011 – 2017, rata-ratanya mencapai 5,18%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 5,75%. Pertumbuhan ekonominya berada dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, pada pasca erupsi dimana gunung Sinabung pada tahun 2010 pertumbuhannya relatif mengalami penurunan, di karenakan terjadi bencana

erupsi Sinabung yang telah merusak produksi tanaman pertanian terkhusus pada sayur-mayur dan buah-buahan. Total Produksi mengalami penurunan yang diikuti dengan turunnya pertumbuhan ekonomi pada wilayah Karo tersebut.

Berdasarkan tabel di bawah tersebut, pada pertumbuhan ekonomi Sektoral yang paling tinggi adalah sektor Jasa Kesehatan dan Sosial sebesar 12,53%, kemudian diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman sebesar 7,77%, selanjutnya peringkat tertinggi pada urutan ke tiga, dan ke empat adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 7,69% dan sektor Jasa Pendidikan 7,55%. Sektor transportasi lebih rendah di bandingkan 4 sektor tersebut yang hanya mencapai 6,68%, dan kemudian ke lima sektor tersebut dimana pertumbuhannya berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo.

Empat sektor yang unggul di Kabupaten Karo yaitu : Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4,38% jadi sektor yang pertumbuhan ekonominya paling rendah. Sedangkan yang terendah yang ke dua yaitu : Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 4,81%, dan Sektor Kontruksi mencapai pertumbuhan sebesar 4,93%. Yang artinya dimana Pemerintah Kabupaten harus memperbaiki sektor ekonomi unggulan untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Pertumbuhan Ekonominya. *Mengrecovery* ekonomi Pasca Erupsi Gunung Sinabung, Yang khususnya sektor ekonomi unggulan yaitu : Sektro Pertanian,

dan Pariwisata. Berikut Perkembangan Ekonomi dapat di lihat pada tabel 4.6

sebagai berikut :

Tabel 4.6
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Karo
ADHK Tahun 2011-2016

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas ADHK (Persen)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.50	4.13	4.22	3.70	4.61	3.91	5.79
Pertambangan dan Penggalian	7.84	5.66	4.36	4.11	3.49	4.63	2.59
Industri Pengolahan	3.42	5.05	5.57	6.55	7.74	6.18	5.96
Pengadaan Listrik dan Gas	8.96	9.22	6.14	9.83	8.45	2.19	2.59
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.99	5.50	6.60	7.49	7.99	2.14	2.41
Konstruksi	4.33	5.05	5.34	6.07	3.66	5.16	5.74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.97	3.36	3.41	6.54	8.42	11.72	5.05
Transportasi dan Pergudangan	7.00	8.90	6.31	6.46	6.30	5.09	4.59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.28	6.96	8.02	7.45	7.99	8.02	2.18
Informasi dan Komunikasi	3.96	4.72	3.82	4.36	4.29	6.52	5.25
Jasa Keuangan dan Asuransi	7.47	8.23	7.29	5.40	7.02	5.66	0.22
Real Estate	8.28	7.14	6.80	8.48	7.41	7.59	3.78
Jasa Perusahaan	3.53	4.98	3.38	4.74	4.10	4.17	5.92
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.92	9.08	7.33	7.72	6.63	2,40	2.06
Jasa Pendidikan	9.37	8.15	6.78	7.66	6.05	7.26	3.06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.55	12.16	10.82	15.03	14.88	8.71	3.98
Jasa Lainnya	17.28	17.07	15.77	11.94	11.34	5.00	4.96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.75	5.09	4.95	5.09	5.01	5.17	5.21

Sumber : BPS Kabupaten Karo Dalam Angka 2018

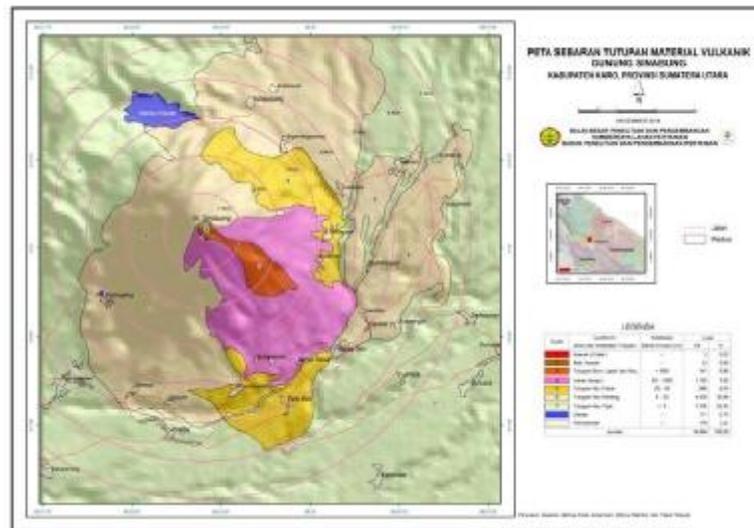
Berdasarkan tabel 4.6 di atas , maka pertumbuhan ekonomi sektoral yang paling tinggi adalah sektor Jasa Kesehatan dan Sosial sebesar 12,53%, kemudian diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman sebesar 7,77%. Sedangkan tertinggi ke 3 dan ke 4 adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 7,69% serta sektor Jasa Pendidikan mencapai 7,55%. Sektor Transportasi lebih rendah dibanding 4 sektor tersebut hanya mencapai 6,68% tapi yang menjadi peringkat ke 5 sektor pertumbuhannya berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo.

4 sektor unggulan di Kabupaten Karo yaitu : Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan hanya 4,38% menjadi sektor yang pertumbuhannya ekonominya paling rendah selanjutnya terendah ke 2 yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 4,81%. Sedangkan sektor Kontruksi mencapai pertumbuhan sebesar 4,93%. Jadi ada fenomena dimana kebalikannya sektor ekonomi unggulan tetapi memiliki pertumbuhan yang terendah di Kabupaten Karo. Yang artinya Pemerintah Kabupaten Karo harus memperbaiki agar sektor ekonomi unggul mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonominya.

4.1.5 Kabupaten Karo Pasca Erupsi Gunung Sinabung

Gambar 4.2

Peta Wilayah Kabupaten Karo Setelah erupsi Gunung Sinabung



Sumber : www.KaroKab.go.id

a. Kondisi Geogarfis

Kabupaten Karo adalah Salah satu daerah yang berada di pada 2° 50' - 3°19' Lintang Utara 97° 55' - 98° 38' Bujur Timur dengan Luas 2.127,25 km² atau 9,97 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Karo berada pada Ketinggian 120 – 1420 m di atas permukaan laut.

Kabupaten ini menempati area luas 2.127,25 km² tentang luas Kabupaten Karo per Kecamatan diamana, 17 Kecamatan dan 269 desa. Area Kabupaten Karo di Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Aceh), Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan Samosir.

4.1.6 Potensi Ekonomi Makro Kabupaten Karo

1. Indikator-Indikator Ekonomi Kabupaten Karo

a. Struktur Ekonomi

Struktur Ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang di ciptakan oleh masing-masing sektor menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari masing-masing sektor.

Untuk menggambarkan struktur perekonomian dimaksud, disajikan tabel distribusi persentase PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku yang dirinci menurut 3 sektor utama yang menggambarkan kondisi perekonomian tahun 2010-2017, yaitu sektor primer, sekunder dan tersier.

Sektor primer mencakup kegiatan pertanian dan penggalian. Sektor sekunder meliputi industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih; serta bangunan. Sektor tersier meliputi perdagangan, hotel, dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, persawaan bangunan, dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa lainnya.

b. Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul disuatu daerah pada periode tertentu. Secara umum data PDRB di sajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan,

Perkembangan ekonomi pada suatu negara atau wilayah dapat dilihat dari indikator ekonomi utama yakni Produk Domestik Bruto (PDB) atau di Indonesia jika di daerah disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Maka untuk melihat perkembangan ekonomi di Kabupaten Karo Khususnya sektor ekonomi

bidang Pertanian dan Pariwisata akan dapat dilihat pada tabel 4.7 PDRB berikut ini :

Tabel 4.7

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian ,Kehutanan dan Perikanan	5572932.34	5879399.2	6122182.24	6380683.3	6616740.89	6855630.73	7123559.75	9967017.70
Pertambangan dan Penggalian	22852.32	24643.4	26039.24	27174.04	28290.73	29279.21	30634.33	39175
Industri Pengolahan	277523.26	287012.82	301505.07	318305.06	339168.34	365420.41	387997.37	640199.30
Pengadaan Listrik dan Gas	7351.42	8009.77	8748.08	9285.38	10198.28	11059.88	11302.38	12072
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	7162.3	7662.65	8084.13	8617.54	9263.27	10003.21	10217.54	12072
Konstruksi	609754.11	636172.22	668289.17	703954.62	746668.59	773987.07	813954.62	857786.30
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	866772.31	901144.37	931451.96	963254.88	1026296.36	1112698.19	1243155.78	1230819.73
Transportasi dan Pergudangan	380694.13	407353.69	443608.08	471592.63	502060.1	533712.37	560896.99	576253.56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	194665.75	210776.7	225446.63	243520.96	261653.1	282555.77	305208.8	299800.76
Informasi dan Komunikasi	88362.1	91858.88	96194.53	99865.28	104222.46	108693.79	115780.93	99566.50
Jasa Keuangan dan Asuransi	107491.38	115524.47	125030.21	134138.68	141384.46	151314.13	159881.14	163228.23
Real Estat	251764.99	272616.2	292083.84	311932.32	338393.87	363485.68	391078.37	362626.70
M,N. Jasa Perusahaan	18187.84	18830.45	19767.9	20435.23	21403.42	22281.45	23210.94	35903.70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	472490.91	505194.1	551061.95	591470.48	637111.04	679357.49	695684.32	1038627.10
Jasa Pendidikan	203341.1	222399.61	240518.72	256827.36	276499.74	293221.63	314507.22	4138627.10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	74365.15	84445.03	94714.87	104963.77	120741.31	138705.89	150793.34	227559.70
R,S,T,U Jasa Lainnya	75467.68	88509.5	103618.11	119963.75	134290.74	149520.75	157003.6	241216.70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9231179.09	9761553.04	10258344.73	1076985.26	11314386.7	11880927.66	12494867.43	18060879.

**Perkembangan Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Kabupaten Karo ADHK Tahun 2010-2017**

Sumber : BPS Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas, nilai PDRB pada Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan merupakan sektor yang utama yang menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karo, Kabupaten tersebut yaitu Produksi Pangan khususnya Holtikultura (Sayur dan Buah-buahan), serta Susu Sapi, berikutnya Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi menduduki Peringkat ke dua, kemudian diikuti oleh Sektor Kontruksi ysng ke tiga, serta Transfortasi dan Pergudangan yang ke empat, Sektor-sektor tersebut sangat mendukung aktivitas produksi dan pemasaran dari sektor pertanian subsektor holtikultura serta bidang pariwisata yang di dukung oleh restoran hotel dan transfortasi serta jasa komunikasi dan informasi yang mendukung seluruh aktivitas tersebut, dan wilayah Kabupaten Karo yang terletak tidak jauh dari kota Medan, dimana kawasan ini sebagai *metropolitan area* yaitu Provinsi Sumatera Utara dimana wilayah Karo merupakan destinasi wisata untuk yang wajib dikunjungi bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kota Medan.

- c. **Distribusi tentang penyebaran penduduk dalam persentase Per Kecamatan di Kabupaten Karo sebelum erupsi Sinabung tahun 2010 dan pasca erupsi**

Tabel 4.8

Distribusi Jumlah Penduduk Bermukim pada per Kecamatan di Kabupaten Karo Sebelum Erupsi di Tahun 2010 dan Setelah Erupsi di Tahun 2016

Wilayah Kecamatan	%	
	2010	2016
Mardingding	4.86	4.86
Laubaleng	5.05	5.07
Tigabinanga	5.67	5.57
Juhar	3.77	3.63
Munte	5.61	5.40
Kutabuluh	3.02	2.91
Payung	3.09	3.03

Tiganderket	3.75	3.60
Simpang Empat	5.42	5.23
Naman Teran	3.65	3.65
Merdeka	3.79	3.96
Kabanjahe	18.04	18.53
Berastagi	12.12	12.56
Tigapanah	8.35	8.49
Merek	5.14	5.14
Dolat Rakyat	2.36	2.36
Barusjahe	6.30	6.01
Karo	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id) yang telah diolah

Dari tabel 4.8 diatas sebagai berikut, dari hasil perbandingan penyebaran penduduk sebelum dan setelah erupsi Gunung Sinabung dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan distribusi suatu penduduk, yang data kontribusinya suatu penduduk pada Kecamatan Se-Kabupaten Karo ternyata tidak ada mengalami perubahan. Padahal jumlah penduduk yang bermukiman di wilayah yang terkena Langsung erupsi Gunung Sinabung pasti mengalami penurunan untuk jumlah penduduk. Berikut Kecamatan yang terkena langsung semburan abu Vulkanik dari erupsi Gunung Sinabung yaitu :

- Kecamatan Payung - Kecamatan Namanteran
- Kecamatan Tigandreket - Kecamatan Simpang Empat

d. Kontribusi Sektoral Dari PDRB

Berdasarkan pada kondisi realitis secara ekonomi dapat dilihat pada data kontribusi atau distribusi sektoral ekonomi yang ada di Kabupaten Karo, maka data Kontribusi sektoral dari PDRB Kabupaten Karo selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9
Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Karo
ADHK Tahun 2010 - 2016

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	60.37	60.03	58.67	58.19	56.55	56.06	55.05
Pertambangan dan Penggalian	0.25	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23
Industri Pengolahan	3.01	3.03	3.14	3.08	3.26	3.38	3.37
Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
Konstruksi	6.61	6.6	6.7	6.78	6.96	7.04	7.13
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	9.39	9.45	9.69	9.72	9.78	9.59	10.23
Transportasi dan Pergudangan	4.12	4.16	4.37	4.55	4.73	4.68	4.63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.11	2.16	2.29	2.37	2.52	2.57	2.6
Informasi dan Komuniakasi	0.96	0.88	0.86	0.79	0.75	0.72	0.71
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.16	1.17	1.26	1.29	1.38	1.42	1.38
Real Estat	2.73	2.75	2.76	2.86	3.03	3.13	3.32
M,N. Jasa Perusahaan	0.2	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.2
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.12	5.16	5.46	5.51	5.83	6.03	5.91
Jasa Pendidikan	2.2	2.23	2.28	2.25	2.35	2.33	2.42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.81	0.88	0.94	0.98	1.1	1.22	1.29

R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.82	0.9	0.98	1.06	1.18	1.25	1.37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100						

Sumber : BPS Kabupaten Karo Dalam Angka 2017

Berdasarkan pada data kontribusi sektoral dari PDRB Kabupaten Karo, maka 6 tahun terakhir yang paling tinggi adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang nilainya rata-rata mencapai 59,64%,. Yang artinya penyumbang paling besar atau lebih dsri setengah dalam pembentukan *output* PDRB dihasilkan dari sektor pertanian, karena sesuai dengan wilayah geografi daerah dataran tinggi sehingga menghasilkan tanaman pangan khususnya hortikultur. Sektor ini akan rentan sekali dengan bencana alam gunung berapi.

e. PDRB Per Kapita

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang Relatif tinggi tersebut belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Karena hal ini sangat bergantung pada Perkembangan Jumlah Penduduk. Jika pertumbuhan penduduk pertengahan tahun lebih tinggi dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun yang sama maka PDRB Perkapitanya akan semakin kecil dan sebaliknya, bila Pertumbuhan jumlah penduduk terjadi lebih lambat, maka PDRB perkapitanya akan semakin besar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses

produksi. Perhitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keutungan). Penyusutan dan pajak tidak langsung neto, jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

f. Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkatan Kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan oleh besarnya jumlah pendapatan yang diterima, namun demikian, penggambaran di tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pendapat sangat sulit dilakukan karena adanya hambatan teknis di lapangan, terutamanya saat wawancara, oleh karena itu, pendapatan rumah tangga di perkirakan dari data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga di bedakan menurut pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Kedua jenis pengeluaran tersebut dapat di jelaskan dengan cukup baik sebagai mana pola konsumsi umumnya masyarakat Kabupaten Karo.

Tabel 4.10

**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo Menurut Pengeluaran(Persen)
2011-2016**

PDRB Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.52	4.80	4.73	4.18	5.58	5.63
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8.56	5.86	7.00	6.88	-0.35	2.72
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.68	5.52	7.53	3.13	2.03	-0.44
Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto	5.95	7.42	4.80	5.63	3.04	4.71

Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	23.69	9.76	0.21	4.51	6.36	4.71
Di kurangi Impor Barang dan Jasa	0.42	35.62	0.04	2.42	3.41	2.31
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5.75	5.09	4.95	5.09	5.01	5.17

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 16,66% per tahun. Dimana adanya peningkatan PDRB yang cukup tinggi setiap tahunnya di Kabupaten Karo.

g. Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja lahan, modal dan kewirausahaan, Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah,sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah ransfer (pemberian Cuma-Cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Ada dua cara penggunaan pendapatan. pertama, membelanjakannya untuk barang-barang konsumsi, kedua, tidak membelanjakannya seperti di tabun. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda – beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

Apabila penerimaan rumah tangga dikurangi dengan pengeluaran untuk konsumsi dan untuk transfer, maka diperoleh nilai tabungan rumah tangga. Kalau perilaku konsumen memperlihatkan dasar pendapatan yang dibelanjakan, maka tabungan adalah merupakan unsur penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tabungan memungkinkan terciptanya modal yang dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Untuk dapat melihat apa yang dilakukan rumah tangga responden atas tabungannya dibutuhkan data tabungan seperti yang disimpan di bank atau koperasi. Jumlah investasi, serta transaksi keuangan lainnya. Berikut tabel 4.11 dapat di lihat berikut ini :

Tabel 4.11

Laju Implisit PDRB Kabupaten Karo Menurut Pengeluaran (Persen) 2011-2016

PDRB Pengeluaran	Laju Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.29	3.22	6.31	4.44	4.40	8.93
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.17	3.86	5.09	0.80	6.58	4.67
Pengeluaran Konsumsi Pemenintah	7.22	6.99	8.79	8.74	5.09	1.97
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6.42	6.83	8.90	5.13	2.18	5.86
Rumah tangga tersebut yang Perubahan Inventori	5.53	-4.91	2.87	1.27	13.87	-1.47
Ekspor Barang dan Jasa	0.47	0.26	5.88	3.72	1.28	-3.34
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-2.08	2.59	5.42	7.70	-0.14	2.53
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5.45	3.95	7.28	3.84	4.42	4.99

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

h. Pengangguran

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping angkatan kerja (economically active population) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia, ketersediaan lapangan pekerjaan yang relatif terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahunnya, tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah dibidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,59 persen : - angkatan kerja pada february 2018 sebanyak 7,23 juta orang penduduk bekerja di Sumatera Utara pada february 2018 sebanyak 6,82 orang – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari

2018 sebesar 5,59 persen atau sebanyak 403 ribu orang, - Sektor Pertanian masih menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu mencapai 38.95 persen pada februari 2018, tetapi jika dibandingkan dengan februari 2017 terjadi penurunan 3,62 poin dibandingkan persentasi penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada februari 2017 yaitu sebesar 42,57 persen. – pada februari 2018 terdapat 35.45 persen penduduk bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu) mencakup 8,18 persen setengah penganggur dan 27.27 persen pekerja paruh waktu. – pada februari 2018 sebesar 62,18 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal persentase pekerja informasi naik 1,29 persen poin dibanding februari 2017.

Tabel 4.12
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karo, 2015

Karo-Sumut	2015	
	Tingkat Pengangguran (Persen)	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Karo	2,23	85,25
Provinsi Sumatera Utara	6,71	67,28

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

dari tabel 4.12 di atas bahwa sanya diperoleh pada tahun 2015 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yaitu Persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja

Kabupaten Karo = 2,23 di Sumatera Utara 6,71

dan sementara TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karo = 85,25 di Sumatera Utara = 67,28.

4.1.7 Kondisi Sosial

1. Indikator – Indikator Sosial Kabupaten karo

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen, dasar kualitas hidup, sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat : pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lam sekolah, adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karo terus mengalami Kemajuan, pada tahun 2010, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 67.09, angka ini meningkat dan tumbuh dari tahun ke tahun hingga ke tahun 2016, Berdasarkan tabel 4,13 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.13

**Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karo,
Tahun 2010-2016**

Karo-Sumut	Indeks Pembangunan Manusia						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Karo	70.36	71.12	71.40	71.62	71.84	72.69	73.29
Provinsi Sumatera Utara	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan masyarakat yang di anggap sangat mendasari yaitu bidang kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, bidang pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta ekonomi yang diukur dengan rata-rata pengeluaran per kapita. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi Kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah Berikut tabel 4.9.3 komponen Indeks Pembangunan Manusia yang dapat dilihat yaitu

Tabel 4.14

Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karo Tahun 2010-2016

Komponen Indeks Pembangunan Manusia	IPM (Tahun)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Angka Harapan Hidup	70.29	70.32	70.34	70.38	70.42	70.62	70.69
Angka Partisipasi Sekolah	11.39	11.84	11.86	11.87	11.89	12.22	12.65
Rata-rata lama Sekolah	8.88	9.03	9.17	9.25	9.33	9.50	9.51
Pengeluaran Perkapita	11 172.53	11 265.21	11 358.66	11 452.88	11 547.89	11 800.26	11.925

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan dayabeli masyarakat terhadap jumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pembangunan untuk hidup layak.

2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi adalah persentasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidik formal.

d. Pengeluaran per kapita

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar

hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

b Penduduk Miskin

3. Jenis-jenis Kemiskinan

- Kemiskinan absolut, Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien.
- Kemiskinan relatif, Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah,
- Kemiskinan Struktural, Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah
- Kemiskinan Sitisional atau Kemiskinan natural, Kemiskinan sitasional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin
- Kemiskinan Kultura, Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka menjadi menjadi miskin. Adapun Garis Kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2010 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel 4.9.1 berikut :

untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi dasar dengan pendekatan, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan, garis kemiskinan (GK) Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dan Garis Kemiskinan makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. Garis kemiskinan Non makanan (GKNM) adalah kebutuhsn minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Peket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di pedesaan.

Tabel 4.15
Garis Kemiskinan Di Kabupaten Karo Tahun 2010-2016

Kabupaten Karo	Garis Kemiskinan (Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Karo	286.191	315.547	347.914	337.578	343.225	357.954	400.261

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, bahwa garis Kemiskinan di Kabupaten Karo mengalami kenaikan yang signifikan dimana, hal ini disebabkan Menurut *World Bank* ada tiga penyebab Kemiskinan, pertama : rendahnya pendapatan dan aset untuk

memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, kedua : ketidakmampuan untuk bersuara dan ketidapan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat, ketiga : rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

- Faktor-faktor Kemiskinan

Kemiskinan terjadi tentunya pasti ada faktor-faktor penyebabnya, di bawah ini ada 2 faktor-faktor paenyebab manusia, yaitu :

Ø Faktor-faktor penyebab kemiskinan secara manusia : adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan secara manusia, yaitu :

1. Sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah, Malas berpikir dan bekerja,
2. Kurang keterampilan,
3. Pola hidup Konsumtif,
4. Sikap apatis/egois/pesimis,
5. Rendah diri,
6. Adanya gep anantara kaya dan miskin,
7. Belenggu adat dan kebiasaan,
8. Adanya teknologi baru hanya menguntungkan kaum tertentu (kaya),
9. Adanya perusak lingkungan hidup,
10. Pendidikan rendah,
11. Populasi penduduk yang tinggi.

Ø Faktor-faktor penyeabab kemiskinan secara non manusia :

Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan secara non manusia :

1. Faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit,

2. Keterampilan atau keterisolasi desa,
3. Sarana perhubungan tidak ada,
4. Kurang fasilitas umum,
5. Langkahnya modal,
6. Tidak stabilnya harga hasil bumi,
7. Industrialisasi sangat minim
8. Belum terjangkau media informasi,
9. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa,
10. Kepemilikan tanah kurang pemerataan.

Tabel 4.16

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Karo 2010-2016

Kabupaten Karo	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Persentase Penduduk Miskin (Persen)						
Kabupaten Karo	11.02	9.93	9.93	9.79	9.20	9.68	9.81

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo mengalami penurunan yang signifikan hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan dan kesehatan. Sehingga mereka mampu mengentaskan kemiskinan. Hal layaknya pada tahun 2010 tingkat kemiskinan Kabupaten Karo pada tahun 2011 dan 2012 terjadi seimbang, faktor alam seperti lahan/kebun dan pertanian juga merupakan suatu usaha masyarakat untuk mencari nafkah, sehingga banyak yang sudah terlepas dari kemiskinan.

c. Rasio Jenis Kelamin (Sek Rasio)

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama, informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politis. Terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Adapun Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Karo dari tahun 2010 sampai dengan 2016 per kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini :

Tabel 4.17

Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Karo Tahun 2010-2016

Wilayah Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mardingding	99.88	99.91	99.60	99.62	99.54	99.66	99.70
Laubaleng	101.10	101.14	100.82	100.84	97.81	99.11	97.94
Tigabinanga	99.30	99.33	99	99.02	98.95	99.50	99.10
Juhar	99.10	99.14	98.83	98.84	99.12	99.80	99.28

Munte	97.91	97.95	97.63	97.66	100.15	99.32	100.32
Kutabuluh	98.05	98.09	97.79	97.80	97.69	97.82	97.86
Payung	98.01	98.04	97.73	97.75	97.66	97.79	97.80
Tiganderket	95.40	95.43	95.13	95.16	95.05	96.15	95.18
Simpang Empat	100.16	100.19	99.88	99.89	99.79	99.93	99.93
Naman Teran	103.95	103.66	103.66	103.67	103.58	97.28	103.72
Merdeka	100.81	100.84	100.52	100.52	100.45	98.83	100.61
Kabanjahe	95.83	95.86	95.57	95.58	95.49	95.79	95.64
Berastagi	99.40	99.43	99.12	99.14	99.04	99.37	99.19
Tigapanah	98.10	98.13	97.82	97.84	97.75	98.56	97.89
Merek	105.28	105.31	104.98	105	104.89	106.01	105.04
Dolat Rakyat	98.09	98.11	97.81	97.81	97.75	97.85	97.89
Barusjahe	97.38	97.42	97.11	97.13	97.04	97.89	97.19
Karo	98.80	98.83	98.52	98.53	98.45	98.57	98.60

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

Berdasarkan pada tabel 4.17 di atas dapat dilihat bahwa, yang paling banyak Rasio Jenis Kelamin Pada per Kecamatan dengan urutan 3 besar yakni, Kecamatan Merek pada urutan pertama tahun 2016 Merek sebanyak 105.04 orang, kemudian diikuti Kecamatan Naman Teran mencapai 103.72 orang dan urutan ketiga adalah Kecamatan Merdeka sebesar 100.61 orang. Bahkan sebaliknya yang paling sedikit Rasio Jenis Kelamin atau masuk 3 terendah adalah Kecamatan Tiganderket hanya mencapai 95.18 orang, diikuti urutan kedua yakni Kecamatan Kabanjahe 95.64 orang. Kemudian yang masuk urutan terendah ketiga adalah Kecamatan Barusjahe sebanyak 97.19 orang.

d. Ketenaga Kerjaan (Employment)

- Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
- Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi
- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Tabel 4.18**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa) Tahun 2010-2016**

Kelompok Umur	Tahun (Satuan orang)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0-4	39 305	38 974	40 673	42 344	44 728	44 074	43 833
5-9	39 553	39 080	37 858	39 069	41 170	42 087	42 921
10-14	36 107	36 484	36 064	34 731	36 528	36 738	37 329
15-19	27 559	29 743	28 957	28 369	29 754	29 784	30 088
20-24	23 603	22 825	24 124	25 001	26 148	26 348	26 758
25-29	28 738	27 747	27 809	28 143	29 583	29 342	29 409
30-34	28 749	28 957	29 631	29 521	30 962	31 003	31 310
35-39	27 371	27 468	27 957	28 223	29 656	30 046	30 460
40-44	24 162	24 842	24 915	25 140	26 435	26 914	27 446
45-49	19 925	20 363	20 865	21 183	22 291	22 951	23 486
50-54	16 411	17 568	17 352	17 704	18 686	19 505	20 041
55-59	12 758	13 070	14 554	15 172	15 958	17 328	18 131
60-64	8 630	9 246	10 135	10 978	11 506	13 127	14 068
65-69	7 206	7 008	7 337	7 708	8 156	8 870	9 513
70-74	4 648	4 794	4 855	5 001	5 212	5 439	5 580
75+	5 835	6 073	5 737	5 468	5 849	6 035	6 225
Total	350 960	354 242	358 823	363 755	382 622	389 591	396 598

Sumber : BPS Kabupaten Karo (www.KaroKab.bps.go.id)

Berdasarkan pada Tabel 4.18 di atas dapat terlihat bahwa, Jumlah Penduduk untuk usia 0-4 pada tahun 2016 sebanyak 43 833 orang dan untuk usia 5-9 sebanyak 42 921 orang, di antaranya untuk di tahun 2014 yang tertinggi sebanyak 44.728 orang,

yang terdiri 446 tenaga kerja , sebagian besar merupakan tamatan SLTA ke atas, dari seluruh pencari kerja yang terdaftar tersebut, belum ada yang di tempatkan.

4.1.8 Wilayah Kecamatan dan Desa yang Langsung Terkena Oleh Erupsi Gunung Sinabung

Sinabung di Kabupaten Karo

Wilayah yang terkena Langsung muntahan vulkanik erupsi Gunung Sinabung pada 4 Kecamatan di Kabupaten Karo dengan radius 5 km yakni :

Tabel 4.19

Data Lokasi Desa yang Letaknya di radius 5 km dari Gunung Sinabung

Kecamatan Simpang Empat	Kecamatan Namanteran	Kecamatan Tiganderket	Kecamatan Payung
Desa Tiga Pancur	Desa Sigaranggarang	Desa Tanjung Merawa	Desa Payung
Desa Berastepu	Desa Bekerah	Desa Tiganderket	Desa Sukameriah
Desa Pintu Besi	Desa Simacem	Desa Perbaji	Desa Gurukinayah
Desa Gamber	Desa Suka Nalu	Desa Temburun	Desa Selandi
Desa Kuta Tengah	Desa Kuta Tonggal	Desa Mardinding	Desa Ujung Payung
Desa Jeraya	Desa Naman	Desa Kutambaru	
Desa Beganding	Desa Kutambelin		
	Desa Kuta Gugung		

Sumber : BPS Kabupaten karo (www.karokab.go.id 2015)

Ada beberapa desa yang wilayahnya berada di lingkaran Gunung Sinabung , dimana desa tersebut sebahagiannya sudah masuk Wilayah Zona Merah. Yang artinya Wilayah dengan Zona Merah sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai tempat tinggal atau pemukiman. Desa yang dimaksud yaitu :

- Ø Kecamatan Simpang Empat : - Desa Tiga Pancur
 - Desa Berastepu
 - Desa Beganding
 - Desa Pintu Besi

- Ø Kecamatan Tiganderket : - Desa Mardinding
- Ø Kecamatan Payung : - Desa Payung
- Ø Kecamatan Namanteran : - Desa Sibintun

4.2 Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Karo Pada 4 Kecamatan yang terkena Langsung Erupsi Gunung Sinabung

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa, dalam melaksanakan program-program dana desa sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan desa melalui potensi geografis, ekonomi, sosial serta lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap

Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka Kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana di maksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang di peruntukan langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap.

Kementerian Keuangan Indonesia memberikan Kebijakan transfer dana daerah berupa Dana Desa yang dilakukan secara merata baik penyebarannya maupun besarnya di seluruh Indonesia tergolong efektif dan masih ada penyalahgunaan transfer dana daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum politisi bahkan kepala Daerah. Denga adanya perbedaan karakteristik luas wilayah, jumlah penduduk, serta angka kemiskinanya dan keadaan perekonomian di setiap desa mengidentifikasi kurang efektifnya penyaluran dana desa. Setiap desa di per kecamatan Kbaupaten Karo memiliki kebutuhannya masing-masing, contohnya saja keadaan desa yang maju dengan keadaan desa yang sedang berkembang jauh berbeda dan APBDesnya juga pasti berbeda. Di desa yang sedang membutuhkan dana desa yang lebih, guna meningkatkan keadaan perekonomian. Berikut dapat di lihat pada tabel 4.21 di bawah ini :

Tabel 4.20
Data Jumlah Perkembangan Dana Desa Kabupaten Karo

2014	18.544.034.000
2015	67.583.746.000
2016	153.840.310.000
2017	196.336.126.000
2018	173.021.882.000

Sumber : <http://www.Kemenkeu.go.id>

Pada tabel 4.21 jumlah dana desa dari tahun 2014-2018 di Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari Tahun 2014-2018, sedangkan di Tahun 2018 dana desa yang ada di Kabupaten Karo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini diakibatkan tidak maksimalnya penggunaan dana desa yang ada di desa pada 4 per Kecamatan, penurunan ini diakibatkan tidak maksimalnya penggunaan dana desa yang ada di desa Kabupaten Karo berbeda-beda sesuai dengan kriteria desanya masing-masing. Dana desa ini digunakan untuk melakukan pembangunan desa terkhususnya di 4 Kecamatan Kabupaten Karo, menunjang aktivitas masyarakat desa di 4 Kecamatan seperti pembangunan jalan desa, jembatan, pasar desa, sarana olahraga, dan embung desa. Selain itu juga dana desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di 4 Kecamatan seperti membangun polindes, air bersih, mck paud, dan penahan Tanah, jadi penggunaan dana desa setiap tahun dari tahun 2010-2016 sampai 2018 di desa per Kecamatan berbeda-beda sesuai dengan yang di butuhkan setiap desa, seperti pembagunan infrastruktur seperti jalan raya, prasarana transportasi umum, jembatan, teknologi dan lain sebagainya. Adapun penyaluran Dana Desa ini adalah untuk pengembangan ekonomi pedesaan melalui BUMDes.

4.2 Perkembangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karo pada 4 Kecamatan Yang Terkena Langsaung Erupsi Sinabung

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk tujuan dan sasaran tertentu serta mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana penyelenggaraan

Urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri dalam Negeri Nomor 140/640 SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang pedoman Alokasi Dana desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk desa. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), desa berpeluang untuk mengelola Pembangunan. Pemerintah dan sosial Kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dana daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Berikut data jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)

Yang disalurkan ke desa pada 4 Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21

Data jumlah perkembangan Dana Desa perdesa (259 :) desa

2019	672 421 000
2018	668 038 154
2017	724 420 000
2016	565 640 000
2015	260 941 104

2014	71 598 586
------	------------

Sumber : <http://www.Kemenkeu.go.id>

Berdasarkan tabel 4.22 jumlah perkembangan dana desa, perdesa pada 259 desa dibagi pada perkecamatan Kabupaten Karo, pertahunnya .pada tahun ketahun mengalami peningkatan pada perdesa. Bahwasannya ADD yang disalurkan setiap perdesa pertahunnya berbeda-beda setiap desanya. Dapapun program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Kabupaten Karo pada 4 Kecamatan adalah untuk biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah desa, untuk biaya Operasional, untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa, untuk bantuan modal usaha desa, untuk bantuan biaya operasional desa, untuk bantuan Pkk, untuk bantuan operasional posyandu, untuk bantuan pengembangan sosial budaya, keagamaan dan pembinaan generasi muda, dana bantuan penyaluran reskin desa, pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini melalui pembangunan fisik dan non fisik.

Dari hasil observasi lapangan pada 4 Kecamatan : kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket dan Kecamatan Payung pada desa tersebut, yang dilakukan di Kantor desa di Kabupaten Karo menunjukkan bahwasannya keakuntabilisan dan keterbukaan tentang pengalokasian Dana Desa masih sangat kurang mengetahui, di karenakan hanya masyarakat beberapa yang ada pada Kecamatan dan desa tersebut yang bertempat tinggal di sekitaran kantor desa saja yang hanya mengetahui besaran pengalokasian Dana Desa, sebaliknya masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor desa banyak yang kurang paham

akan tentang Alokasi Dana Desa tersebut mereka hanya mengetahui apa apa saja yang dibangun, karena dalam bentuk fisik yang terlihat dimata.

Minimnya informasi tentang pengalokasian Dana Desa di sebabkan oleh pemerintah dan aparatur desa menginformasikan hanya melalui musyawarah desa dan hanya di hadiri oleh perwakilannya saja, serta melampirkan baliho dan spanduk yang hanya itu terpasang di kantor desa. Maka dari itu minimnya pengetahuan dan keikutsertaan masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa dapat mengindikasikan terjadinya penyelewengan anggaran Dana Desa

4.3. Persepsi Dana Desa Terhadap kualitas hidup masyarakat di desa yang terkena langsung erupsi sinabung

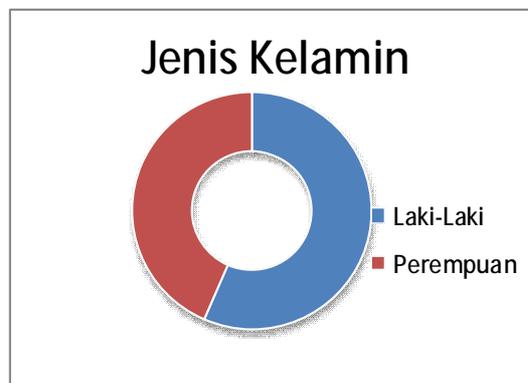
1. Deskriptif Data

Responden yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah, masyarakat desa pada 4 Kecamatan mengenai Dana Desa. Responden yang diguraukan sebagai sampel penelitian sebanyak 50 orang. Melalui Kuesioner maka di peroleh daftar data responden wanita dan pria, usia yang berbeda, tingkat pendidikan dan pekerjaan serta melakukan pendidikan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan dari analisis mengenai hasil jawaban kuesioner dan juga gambaran responden yang menjawab kuesioner.

Tabel 4.22

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	23	39.3	42.3	48.1
	PEREMPUAN	27	48.2	51.9	100.0
	Total	49	100.0	100.0	



Gambar 4.3

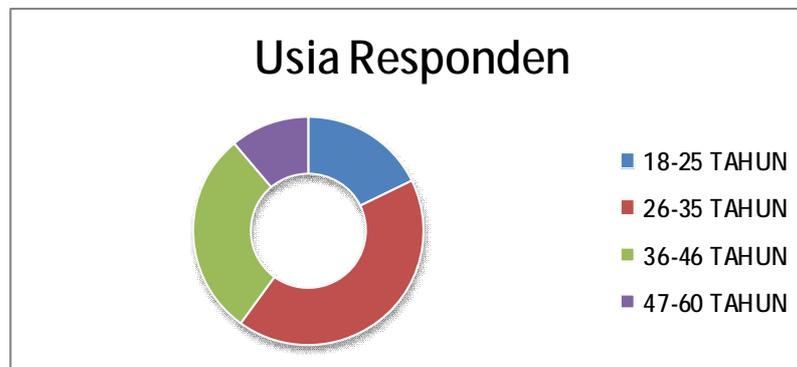
Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil survey yang diperoleh dari 50 responden sekitar 20 % responden berjenis kelamin laki-laki atau berjumlah 23 orang, serta sebesar 25 % responden berjenis kelamin perempuan atau berjumlah 27 responden berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.23

Usia Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-25 TAHUN	5	10.7	10.7	12.5
	26-35 TAHUN	33	58.9	58.9	73.2
	36-46 TAHUN	11	19.6	19.6	94.6
	47-60 TAHUN	1	1.8	1.8	96.4
Total		50	100.0	100.0	



Gambar 4.4

Usia Responden

Berdasarkan tabel diatas dari 50 responden yang tersebar di Kabupaten Karo maka diperoleh bahwasanya sebanyak 5 responden berusia 18-25 tahun, 33 responden berusia 26-35 tahun, 11 responden berusia 36-46 tahun dan 1 responden berusia 47-60 tahun. Adapun teknik menentukan responden menggunakan metode acak tanpa harus ditentukan jumlah mewakili masing-masing usia responden.

Tabel 4.24
Jenis Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PETANI	46	87.5	87.5	89.3
	NELAYAN	1	1.8	1.8	91.1
	TENAGA PENDIDIK	1	1.8	1.8	92.9
	WIRASWASTA	1	1.8	1.8	94.6
	LAINNYA	1	1.8	1.8	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

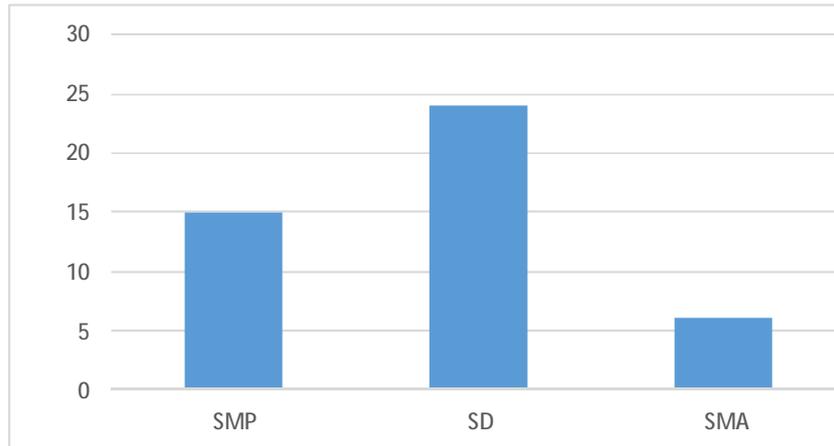
Selanjutnya berdasarkan data diatas pada jenis pekerjaan untuk Petani sebanyak 46 orang, untuk Nelayan sebanyak 1 orang, untuk Tenaga Pendidik sebanyak 1, untuk Wiraswasta sebanyak 1 orang dan pekerjaan lainnya sebanyak 1 orang.

Tabel 4.25
Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	29	58.0	58.0	58.0
	SMP	18	36.0	36.0	94.0
	SMA	3	6.0	6.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Gambar 4.5

Pendidikan

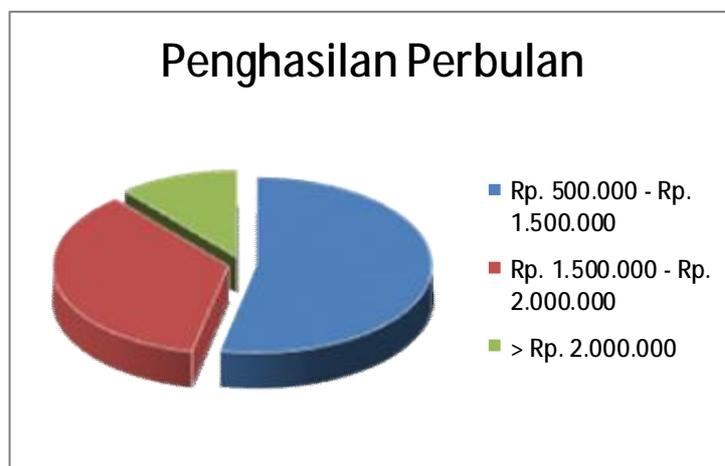


Selanjutnya berdasarkan data diatas pada tingkat pendidikan responden terdapat 29 orang tamatan SD, 18 orang tamatan SMP dan 3 orang tamatan SMA.

Tabel 4.26

Penghasilan perbulan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rp. 500.000 >Rp. 1.500.000	7	14.0	14.0	14.0
	Rp. 1.500.000 > Rp. 2.000.000	27	54.0	54.0	68.0
	> Rp. 2.000.000	16	32.0	32.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	



Gambar 4.6

Penghasilan

berdasarkan data diatas pada tingkat penghasilan responden perbulannya adalah Rp. 500.000 - Rp. 1.500.000 sebanyak 7 orang, untuk berpenghasilan Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000 sebanyak 27 orang dan untuk berpenghasilan > RP 2.000.000 sebanyak 16 orang

4.3.1 Pembahasan Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan valid atau tidaknya data penelitian. Berikut ini adalah hasil pengujian validitas penelitian :

Tabel 4.27

Uji Validitas

No Item		Jumlah	Keterangan
ME1	Pearson Correlation	.478*	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
ME2	Pearson Correlation	.750*	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
ME3	Pearson Correlation	.842*	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
ME4	Pearson Correlation	.650*	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
ME5	Pearson Correlation	.771*	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
ME6	Pearson Correlation	.647*	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
KHMD7	Pearson Correlation	.579*	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
KHMD8	Pearson Correlation	.584*	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
KHMD9	Pearson Correlation	.637*	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
KHMD10	Pearson Correlation	.739**	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
PB11	Pearson Correlation	.717**	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
PB12	Pearson Correlation	.765**	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	
PB13	Pearson Correlation	.734**	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	50	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil pengujian validitas diketahui bahwa dari 13 butir pertanyaan untuk mengungkap tentang persepsi dana desa terhadap kualitas hidup masyarakat di desa yang terkena langsung erupsi sinabung dinyatakan valid. Berdasarkan hal itu maka untuk melakukan analisis persepsi dana desa terhadap kualitas hidup masyarakat di desa yang terkena langsung erupsi sinabung Kabupaten Karo digunakan 2 Variabel.

2 Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas berfungsi untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil pengukuran tetap konstan . pada uji reliabilitas, pengukuran kuisioner dapat dikatakan reliabel apabila cronbach's alpha mempunyai nilai lebih dari 0,6.

Tabel 4.28

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.763	14

Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai reabilitas pertanyaan tersebut hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alpha dari seluruh pertanyaan yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian ini masih berada di atas *cut of value* > 0,60. Ini berarti bahwa semua pertanyaan yang dijadikan sebagai instrument dapat dipercaya kendalanya. Dari hasil reliabilitas instrument penelitian dapat disimpulkan

bahwa seluruh pertanyaan yang digunakan adalah reliabel. Tingkat reliabilitas penelitian sudah memadai karena semua variabel di atas 0,60.

4.3.2 Pembahasan Analisis Faktor

Analisis Faktor eksploratori atau analisis komponen utama (PCA = *Principle component analysis*) yaitu suatu teknik analisis faktor di mana beberapa faktor yang akan terbentuk berupa variabel laten yang belum dapat ditentukan sebelum analisis dilakukan. Proses analisis faktor eksploratori mencoba untuk menemukan hubungan antarvariabel baru atau faktor yang terbentuk yang saling independen sesamanya, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel laten atau faktor yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal yang bebas atau tidak berkorelasi sesamanya. Jadi antar faktor yang terbentuk tidak berkorelasi sesamanya.

1. Matriks Korelasi (KMO)

13 Variabel yang diuji, dimasukan ke analisis faktor untuk di uji nilai KMO dan Bartlett Test dan MSA (*measures of sampling adequacy*), nilai MSA harus diatas 0,5 Berikut n adalah tabel dari hasil KMO dan Bartlett Test.

hasil KMO dan Bartlett Test.

Tabel 4.29
KMO and Bartlett's Test

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.757
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	635.802
	Df	78
	Sig.	.000

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa nilai KMO menunjukkan 0,808 dengan taraf signifikan 0,000. Pada tabel tersebut, nilai KMO lebih besar dari 0,5 maka analisis faktor tepat untuk digunakan atau dapat dikatakan data tersebut memenuhi syarat kecukupan sampling dan dapat diteliti lebih lanjut

2. Uji MSA (Measure of Sampling Adequacy)

Uji MSA digunakan untuk mengukur kecukupan sampling pada setiap indikatornya. Apabila MSA memiliki nilai kurang dari 0,5 maka pernyataan tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut dan harus dikeluarkan, sedangkan untuk MSA lebih dari 0,5 maka dapat dianalisis lebih lanjut.

Tabel 4.30

Uji MSA

No.	Variabel	Nilai <i>Measure of Sampling Adequacy</i> (MSA)
1	ME1	.619 ^a
2	ME2	.870 ^a
3	ME3	.832 ^a
4	ME4	.755 ^a
5	ME5	.771 ^a
6	ME6	.829 ^a
7	KHMD7	.759 ^a
8	KHMD8	.812 ^a
9	KHMD9	.728 ^a
10	KHMD10	.680 ^a
11	KHMD11	.747 ^a
12	KHMD12	.670 ^a
13	KHMD13	.850 ^a

Berdasarkan tabel diatas dari 13 indikator, yang memiliki nilai MSA lebih dari 0,5 adalah semua indikator. Jadi, semua indikator dinyatakan valid dan tidak ada yang dikeluarkan.

3. Ekstraksi Faktor

Uji *Communalities* berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar indikator dapat menjelaskan faktor. Semakin besar nilai dari tiap-tiap indikator pada *communalities* berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk.

Tabel 4.31
Uji Communalitas

	Communalities	
	Initial	Extraction
ME1	1.000	.807
ME2	1.000	.763
ME3	1.000	.912
ME4	1.000	.795
ME5	1.000	.801
ME6	1.000	.737
KHMD7	1.000	.643
KHMD8	1.000	.677
KHMD9	1.000	.652
KHMD10	1.000	.727
KHMD11	1.000	.601
KHMD12	1.000	.688
KHMD13	1.000	.772

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Untuk indikator Sosialisasi Dana Desa pertanyaan yang nomor 1 bernilai sebesar 807 yang artinya indikator Sosialisasi untuk Dana Desa pertanyaan yang

nomor 1 yaitu Tahukah anda tentang pengucuran Dana Desa dapat menjelaskan faktor sebesar 781 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Dana Desa pertanyaan yang nomor 2 bernilai sebesar 763 yang artinya indikator Sosialisasi Dana Desa pertanyaan yang nomor 2 yaitu Tahukah anda tentang jenis usaha di Desa ini dapat menjelaskan faktor sebesar 90,7 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Dana Desa pertanyaan yang nomor 3 bernilai sebesar 912 yang artinya indikator Sosialisasi Dana Desa pertanyaan yang nomor 3 yaitu Masyarakat desa ikut terlibat dalam kegiatan Dana Desa dapat menjelaskan faktor sebesar 665 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Dana Desa pertanyaan yang nomor 4 bernilai sebesar 795 yang artinya indikator Sosialisasi Dana Desa pertanyaan 4 yaitu Pemerintah desa melakukan Sosialisasi Dana Desa kepada masyarakat dapat menjelaskan faktor sebesar 80,3 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Dana Desa pertanyaan yang nomor 5 bernilai sebesar 801 yang artinya indikator Sosialisasi Dana Desa pertanyaan yang nomor 5 yaitu Dana Desa membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dapat menjelaskan faktor sebesar 77,7 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Dana Desa pertanyaan yang nomor 6 bernilai sebesar 737 yang artinya indikator Sosialisasi Dana Desa pertanyaan yang nomor 6 yaitu Dana Desa menerima hasil usaha masyarakat desa untuk dikelola dan di pasarkan dapat menjelaskan faktor sebesar 31,4 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Pembentukan pertanyaan nomor 7 dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Pembentukan Dana Desa pertanyaan nomor 7 bernilai sebesar 0,643 yang artinya indikator Sosialisasi Pembentukan Dana Desa pertanyaan nomor 7 yaitu Tahukah anda pembentukan

Alokasi Dana Desa di desa ini dapat menjelaskan faktor sebesar 80,9 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Pembentukan Dana Desa pertanyaan nomor 8 bernilai sebesar 0,677 yang artinya indikator Sosialisasi Pembentukan Dana Desa pertanyaan nomor 8 yaitu Pemerintah desa melakukan sosialisasi pembentukan Dana Desa dengan masyarakat dapat menjelaskan faktor sebesar 86,6 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Pembentukan Dana Desa pertanyaan nomor 9 bernilai sebesar 0,652 yang artinya indikator Sosialisasi Pembentukan Dana Desa pertanyaan nomor 9 yaitu Tahukah tujuan dibentuknya Dana Desa di desa ini dapat menjelaskan faktor sebesar 63,7 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Sosialisasi Pembentukan Dana Desa pertanyaan nomor 10 bernilai sebesar 0,727 yang artinya indikator Sosialisasi Pembentukan Dana Desa pertanyaan nomor 10 yaitu Tahukah anda Pembentukan Dana Desa harus sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dapat menjelaskan faktor sebesar 80,9 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Peran Dana Desa pertanyaan nomor 11 bernilai sebesar 0,601 yang artinya indikator Peran Dana Desa pertanyaan nomor 11 yaitu Dana Desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dapat menjelaskan faktor sebesar 60,1 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Peran Dana Desa pertanyaan nomor 12 bernilai sebesar 0,688 yang artinya indikator Peran Dana Desa pertanyaan nomor 12 yaitu Dana Desa dapat meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) dapat menjelaskan faktor sebesar 68,8 % dari seluruh faktor yang terbentuk. Indikator Peran Dana Desa pertanyaan nomor 13 bernilai sebesar 0,772 yang artinya indikator Peran Dana Desa pertanyaan nomor 13 yaitu Penyelenggara unit usaha Dan Desa

memberikan pelayanan yang sama kepada semua masyarakat dapat menjelaskan faktor sebesar 77,2 % dari seluruh faktor yang terbentuk.

4. Total Variance Explained

Pada penelitian ini proses ekstraksi yang digunakan yaitu menggunakan metode PCA (Principal Component Analysis). Faktor-faktor yang mempunyai nilai eigenvalues kurang dari 1 maka tidak mempunyai anggota variabel pembentuk faktor, kemudian apabila nilai eigenvalues lebih besar dari 1 maka termasuk suatu faktor yang signifikan.

Tabel 4.32
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6.290	48.388	48.388	6.290	48.388	48.380	4.270	32.842	32.842
2	2.446	18.813	67.201	2.446	18.813	67.201	3.843	29.558	62.401
3	1.403	10.795	77.995	1.403	10.795	77.995	2.027	15.594	77.995
4	.765	5.882	83.878						
5	.566	4.357	88.235						
6	.454	3.492	91.727						
7	.315	2.421	94.148						
8	.266	2.047	96.196						
9	.170	1.310	97.505						
10	.145	1.112	98.617						
11	.092	.706	99.323						
12	.080	.617	99.940						
13	.008	.060	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Berdasarkan tabel *Total Variance Explained*, menunjukkan bahwa terdapat faktor yang terbentuk dan faktor yang tidak terbentuk atau faktor yang tidak signifikan yaitu tidak memenuhi syarat dari *Principal component analysis* (PCA) dapat dilihat dari nilai *eigenvalues* yang harus diatas 1 untuk membentuk faktor. Pada komponen 1 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 6.290, dan pada komponen 2 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 2.446 dan pada komponen 3 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 1.403. dan pada komponen 4 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 765.

Pada komponen 5 sampai 13 tidak memiliki nilai diatas 1. Jadi komponen 5 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,566. komponen 6 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,454 komponen 7 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,315, komponen 8 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,266, komponen 9 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0.170, komponen 10 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,145. komponen 11 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,092, komponen 12 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0,080, komponen 13 terdapat nilai *eigenvalues* sebesar 0.008,

5. Faktor Loading

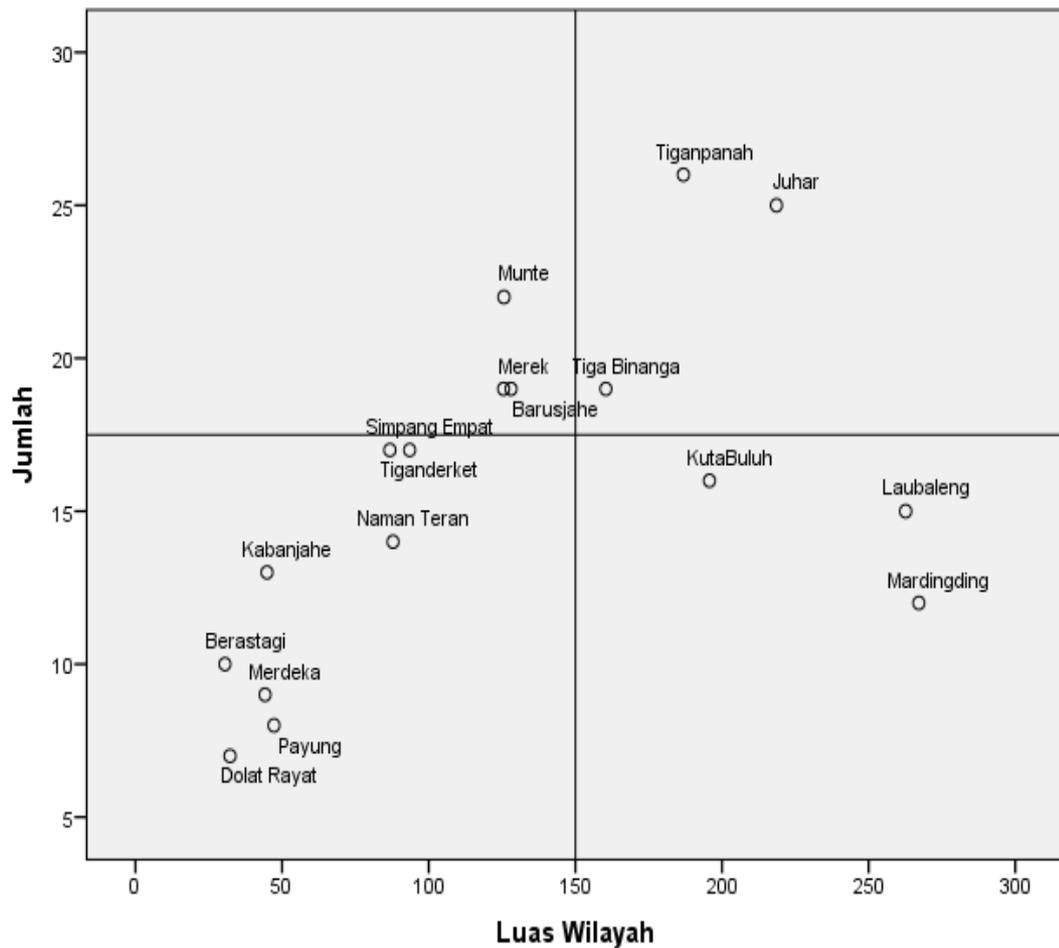
Pengelompokkan variabel ke dalam faktor dapat ditentukan berdasarkan dari nilai factor loading yang menunjukkan besarnya korelasi pada masing-masing indikator dengan faktor yang dibentuk. Loading factor yang memiliki nilai terbesar berarti dapat menjelaskan bahwa indikator tersebut menjadi satu keanggotaan kelompok faktor yang terbentuk

Tabel 4.33
Faktor Loading

tipologi daerah terutama tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah (Kabupaten/Kota).

a. Analisis Tipologi Klassen Indeks Ketimpangan Produksi Sub-Sektor tanaman Pangan dan Holtikultura

Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan kepada dua indikator utama yaitu jumlah tanaman pangan dan luas lahan. Dengan menentukan rata-rata jumlah tanaman pangan sub sektor sebagai sumbu vertikal dan jumlah tanaman pangan sebagai sumbu horizontal, sedangkan daerah perkabupaten/kota dibagi menjadi empat golongan. Yaitu Kabupaten/Kota yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), Kabupaten/kota maju tapi tertekan (*high income but low growth*), Kabupaten/Kota yang berkembang cepat (*high growth but low income*), daerah yang diamati dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Karo yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan pengklasifikasi menjadi empat kuadrat, yaitu daerah cepat maju dan tumbuh (*High Growth and High Income*), daerah maju tapi pertumbuhan ekonominya lambat (*High Income but low Growth*), daerah berkembang cepat (*High Growth but low Income*) dan daerah relatif tertinggal (*Low Growth and Low Income*), penerapan analisis ini dilakukan dengan menghitung jumlah tanaman pangan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan Jumlah luas lahan pada tahun 2013.



Sumber : Data SPSS diolah

Berdasarkan hasil analisis tipologi Klassen yang tertera pada gambar . Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 Kabupaten/Karo di bagi ke dalam 4 Kabupaten 4 kecamatan berdasarkan pada laju Pertumbuhan Penduduk dan luas lahan pangan yang tersedia. Hasil klasifikasi per Kabupaten Karo/Kota pada tahun 2010-2016 diperoleh sebagai berikut :

Produksi Sub sektor tanaman pangan dan Holtikultura pasca erupsi Sinabung	(yI>y)	(yI<y)
(ri>r)	(kuadrat I) Juhar, Tiga Panah, Tiga Binga	(kuadrat II) Munte, merek, burusjahe, Simpang Empat
(ri<r)	(Kuadrat III) Kutubuluh, laubaleng, Mardingding	(Kuadrat IV) Tiganderket, Namen Teran, KabanJahe, Berastagi, merdeka, payung, Dolat Rakyat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Analisis Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Pedesaan Pasca Erupsi Sinabung. Di Kabupaten Karo Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Di Kabupaten Karo sebelum dana setelah hanya pertumbuhan sebesar 5,21% tahun 2017 dari pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo 6,03% selama setahun sebelumnya semua sektor ekonomi yang membentuk PDRB mengalami pertumbuhan positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan naik hingga menunjukkan angka tertinggi.

Sedangkan untuk Kondisi Sosial di Kabupaten Karo seperti tingkat Kemiskinan juga mengalami penurunan secara perlahan setelah kejadiannya pasca erupsi Gunung Sinabung, Jumlah fasilitas pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Karo juga mengalami perubahan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama tahun 2010 sampai 2016 memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat hingga 5,59 % namun pada saat setelah terjadinya pasca erupsi Gunung Sinabung di pada tahun

2010 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Karo menurun dari total lapangan pekerjaan yang tersedia.

Untuk sektor unggulan di Kabupaten Karo setelah pasca erupsi tetap unggul di sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan hingga 19,27 dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dimana di dalamnya di dominasikan oleh sektor pertambangan dan penggalian

2. Perkembangan dana desa pada 4 Kecamatan Kabupaten Karo adanya jumlah perkembangan dana desa, perdesa pada 259 desa dibagi pada perkecamatan Kabupaten Karo, pertahunnya .pada tahun ketahun mengalami peningkatan pada perdesa.

dana desa yang ada di Kabupaten Karo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini diakibatkan tidak maksimalnya penggunaan dana desa yang ada di desa pada 4 per Kecamatan , penurunan ini diakibatkan tidak maksimalnya penggunaan dana desa yang ada di desa Kabupaten Karo berbeda-beda sesuai dengan kriteria desanya masing-masing.

3. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dan APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardesa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa serta pelayanan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan membangun

perekonomian Indonesia dari pinggiran, salah satunya dengan Pemanfaatan dengan Adanya Dana Desa.

4. Dari Hasil pengujian analisis faktor menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang dimana mempengaruhi persepsi Kualitas hidup masyarakat tentang Dana Desa. Dimana hal ini dibuktikan dari pernyataan variabel sosialisasi akan adanya Dana Desa, Sosialisai Pembentukan Dana Desa, peran dalam Dana Desa dan keterlibatan masyarakat akan dana desa dengan Alokasi Dana Desa.

Dalam Pendanaan Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum tepat dan belum berjalan dengan semestinya untuk membangun Perekonomian Desa pada 4 Kecamatan yang berada di Kabupaten Karo, terutama dalam potensi desa melalui bantuan yang ada, fakta meuktikan dengan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang sudah berjalan di beberapa desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari Kesimpulan penelitian ini, maka peneliti mencoba memberi beberapa saran kepada elemen-elemen yang tertarik pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan di atas penulis menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Karo, dan Provinsi Sumatera Utara dan juga Kepada akademisi yang akan melakukan penelitian yasnng sejenis adalah berikut:

5.2.1 Bagi Dunia Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, yaitu pengaruh Kebijakan Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi pedesaan.

5.2.2 Bagi 4 Kecamatan di Kabupaten Karo

Kepada pemerintah, pembangunan desa agar dapat di wujudkan, hal ini akan membantu masyarakat untuk merubah kehidupan mereka yang saat ini tidak layak untuk mereka, dengan terciptanya desa maka mendapatkan perekonomian yang baik dari sebelumnya untuk keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, (2017)
- BPS Kabupaten Karo (dalam berbagai tahun) di www.karokab.bps.go.id
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Dana Desa Tahun 2015-2018 <http://www.kemenkeu.go.id>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas)*. Jakarta : Erlangga.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (Edisi kedua ed.). Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, Kebijakan*. (Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Andhini, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Volume 7*, 1-34.
- Arifianto, W., & Setiyono, I. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 2-16.
- Bhinadi, A. (2013). Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8, 39 – 48.
- Boediono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, N. G. (2007). *Macroeconomics*, Jakarta: Erlangga.
- Suparmoko, (1998) “*Pengantar Ekonomi Makro*”. BPFE-UGM Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, Kebijakan*. (Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Kuncoro, Mudrajat (2014). *Otonomi Daerah*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : Penerbit

Erlangga

Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta Pt Raja Gramedia Perkasa.

Sumber lainnya :

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2016).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.

UU Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Lonaria Sitepu, (2012). *Pola Adaptasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gunung Sinabung . (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Suka Meriah Kecamatan Payung Kabupaten Karo)*.

Sumber Online :

<http://www.airputih.or.id/program-portal-pusat-informasi-bencana-indonesia>

diakses pada senin, 19 Januari 2015 Pukul 14.37

<http://alamendah.org/2011/08/29/indonesia-negara-paling-rawan-bencana-alam/>

diakses pada senin, 19 Januari 2015 Pukul 14.56

<http://waspada.co.id> diakses tanggal 19 Januari 2015 Pukul 15.19 WIB

<http://suarakomunitas.net/baca/10786/tipe-a--hanya-gunung-sorik-merapi--di->

sumatera-utara%2528ii%2529/ diakses pada Senin, 19 Januari 2015 Pukul 15.30

<http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/66/Sinabung-Erupsi-Petani-Rugi-Rp721M/2014/01/16> diakses tanggal 21 Januari 2015 Pukul 18.16

http://www.karokab.go.id/in/index.php/gunung-sinabung/data-pengungsi/3657-data_pengungsi-erupsi-gunung-sinabung-kab-karo-tgl-01-Maret-2015 diakses tanggal 20 Maret 2015 pukul 00.41

<http://www.mongabay.co.id/tag/gunung-sinabung-meletus/> diakses tanggal 26

Februari pukul 13.46

<http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana> diakses

tanggal 6 Maret 2015 pukul 21.12